

D. Kesejahteraan Masyarakat

Proyek pertambangan berpotensi mengubah masyarakat secara positif dan negatif. Keuntungan ekonomi mungkin bisa dipetik melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang bagi bisnis lokal untuk memasok jasa atau produk ke pertambangan. Pada sisi lain, pertambangan juga dapat mengurangi atau merusak sumber daya alami yang memberikan sumber makanan, nafkah, dan layanan kepada masyarakat. Karakter sosial sebuah masyarakat juga bisa berubah akibat masuknya tenaga kerja pertambangan migran. Pendapatan dan keuntungan terkait pertambangan bisa jadi tidak didistribusikan secara merata, yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat dan bahkan keluarga. Jika digabungkan, dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan pertambangan bisa memicu pelanggaran berbagai hak asasi manusia.

Seperti halnya dengan hubungan jangka panjang, hubungan perusahaan-masyarakat merupakan hal yang kompleks. Perusahaan tambang sering menghadapi tantangan dalam memenuhi keinginan kelompok yang berbeda-beda sehingga tanpa perencanaan dan intervensi yang matang, konflik bisa dipastikan akan muncul. Perusahaan yang melakukan

pendekatan pada masyarakat sejak awal-awal siklus hidup proyek dan menunjukkan kesediaan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan secara terbuka dan penuh penghargaan berpeluang lebih besar untuk menumbuhkan kepercayaan. Dan perusahaan yang menerapkan sistem yang efektif untuk menerima dan menyelesaikan keluhan masyarakat akan lebih berpeluang mempertahankan hubungan yang positif dan berhasil mencegah atau mengatasi risiko dan dampak hak asasi manusia.

Penciptaan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang positif membutuhkan pelibatan aktif masyarakat di sepanjang siklus hidup pertambangan. Melalui kerja sama yang berkelanjutan dengan beraneka ragam pemangku kepentingan, termasuk kelompok marginal dan rentan di dalam perencanaan, perancangan, dan implementasi penanaman sumber daya di masyarakat yang disponsori tambang dan peluang terkait tambang, perusahaan tambang lebih bisa memastikan bahwa masyarakat yang ditinggalkan oleh usaha pertambangan adalah masyarakat yang sehat dan mampu bertahan hidup.

D.01 Hak Asasi Manusia

Operasi pertambangan berpotensi memengaruhi serangkaian hak asasi manusia, mulai dari hak-hak spesifik pekerja (Lihat Bagian E), perempuan (Lihat D.07), anak (Lihat D.04), atau Masyarakat Adat (Lihat D.08 dan D.09) hingga hak-hak yang berlaku bagi semua umat manusia. Bergantung pada konteks politik, sosial, dan operasional di pertambangan (misalnya, Lihat D.02, D.05, D.10, dan D.11), hak asasi manusia lainnya bisa terkena dampaknya, meliputi hak akan kesehatan, air bersih yang aman, standar hidup yang layak; kehidupan, kebebasan, dan keselamatan manusia; nondiskriminasi; lingkungan kerja yang aman; kebebasan beraktivitas; akses ke penyelesaian pelanggaran; atau yang lain-lain.

Para pembela hak asasi manusia (HAM), tanah, lingkungan, dan hak buruh mendapatkan hak dan perlindungan khusus, seperti dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. Namun secara global, anggota masyarakat, Masyarakat Adat, pembela hak buruh, organisasi serikat pekerja, pembela hak atas tanah, lingkungan, serta para pembela HAM yang menyatakan perlawanan terhadap proyek pertambangan terus mengalami pelanggaran HAM, stigmatisasi, pelecehan, penyerangan, atau lainnya yang lebih buruk. Global Witness mencatat 212 pembunuhan terhadap para pembela lahan dan lingkungan pada 2019, dan sektor pertambangan menduduki peringkat pertama, di atas sektor agrobisnis, dari sisi jumlah pembunuhan tersebut.

Kini sudah diterima luas bahwa semua perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia dari PBB (yaitu, UNGP) merupakan standar global otoritatif tentang bisnis dan hak asasi manusia, yang membekali perusahaan dengan kerangka kerja untuk menjalankan uji tuntas guna mengatasi risiko dan dampak terkait HAM.

UNGP menganjurkan agar perusahaan menilai risiko dari aktivitas perusahaan terhadap hak asasi manusia, atau menilai risiko yang mungkin berhubungan langsung dengan operasi, produk, atau layanan mereka melalui hubungan bisnis (Lihat juga B.08). Prinsip UNGP tersebut menetapkan bagaimana tindakan perusahaan semestinya memprioritaskan hak asasi manusia yang paling menonjol bagi operasi pertambangan, yaitu, yang berisiko menimbulkan dampak negatif paling berat bagi manusia.

Ketika risiko terhadap hak asasi manusia berhasil diidentifikasi, perusahaan diharapkan mengambil langkah-langkah untuk mencegah, memitigasi, dan menanggulangi dampak, termasuk memberikan pemulihan bagi korban (Lihat D.12). Selain itu, ketika perusahaan tambang menyadari kasus-kasus pelanggaran HAM yang nyata di wilayah operasionalnya, norma internasional menyatakan bahwa perusahaan hendaknya melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang pemerintah yang relevan dan badan-badan hak asasi manusia internasional.

Aspek lain dari uji tuntas hak asasi manusia meliputi keterlibatan pemangku kepentingan, yang bisa meliputi pendekatan kolaboratif dan partisipatif terhadap penilaian risiko dan dampak terkait HAM; menerapkan mekanisme bagi pemangku kepentingan untuk mengadukan keluhan terkait HAM (Lihat D.12); memantau efektivitas tindakan perusahaan; dan mengomunikasikan pola penyelesaian risiko. Kerangka Pelaporan UNGP memberikan panduan bagi perusahaan tentang cara melaporkan penanganan risiko terkait hak asasi manusia secara efisien dan utuh terpadu

Perusahaan yang melakukan uji tuntas HAM secara menyeluruh dapat memetik keuntungan keuangan dan reputasi, dan berpeluang lebih besar memberikan kontribusi positif bagi hasil yang disasar oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (yaitu, menghapus kemiskinan, melindungi bumi, dan menjamin kemakmuran bagi semua manusia). Pencegahan, mitigasi, dan penyelesaian pelanggaran HAM meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan pekerja yang terbaik dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin; meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; membantu memperkuat lembaga dan akuntabilitas pemerintah; dan berkontribusi bagi iklim investasi yang lebih menarik, yang kesemuanya membantu mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Komitmen	<p>Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak-Hak Asasi Manusia dari PBB.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan UNGP? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?
-----------------	--

Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak-Hak Asasi Manusia dari PBB, untuk melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia secara rutin di seluruh operasinya, untuk menilai dan mengatasi risiko hak-hak asasi manusia.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai dampak nyata aktivitasnya terhadap hak asasi manusia? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mencegah, mengurangi, dan mempertimbangkan cara menyelesaikan dampak-dampak yang sudah teridentifikasi ini? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?
-----------------	--

Efektivitas

Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya dalam mencegah dan mengatasi dampak buruk terhadap HAM terkait dengan wilayah operasinya.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan data, sepanjang kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mencegah dan mengatasi dampak buruk terhadap HAM di seluruh lokasi tambangnya, termasuk jumlah dan karakteristik kasus dan tindakan yang diambil?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk terhadap HAM?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas dari tindakan yang diambil untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk terhadap HAM?

Komitmen

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada para pembela HAM, tanah, lingkungan, dan hak buruh di dalam wilayah operasinya.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Merealisasikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada para pembela HAM, tanah, lingkungan, dan hak buruh di dalam wilayah operasinya?
- b. Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- c. Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

D.02 Keamanan dan Wilayah Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi (Security and Conflict-Affected and High Risk Areas/CAHRAs)

Banyak pertambangan yang beroperasi di tempat-tempat yang penuh tantangan mengandalkan satuan keamanan swasta atau publik untuk melindungi karyawan, produk, dan harta benda mereka. Meskipun penyedia jasa keamanan dapat membantu menjaga kestabilan dan menegakkan aturan hukum di lokasi tambang, tetap saja ada risiko kurangnya pengawasan, pelatihan yang tidak memadai, atau kondisi-kondisi lain bisa mengarah ke penggunaan upaya paksa secara tidak semestinya dan pelanggaran HAM oleh penyedia jasa keamanan tersebut.

Ketika pengamanan tidak dilaksanakan dengan cara-cara yang menghormati HAM, dampak buruknya bisa dirasakan secara tidak semestinya oleh kelompok tertentu seperti para pembela HAM (Lihat D.01), Perempuan, atau anak. Ada banyak sekali contoh tuduhan yang dialamatkan ke perusahaan ekstraktif atas keterlibatan mereka dalam tindakan represif terhadap protes, yang kadang-kadang menimbulkan korban jiwa atau pelecehan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus tertentu, tuduhan dilontarkan dalam hubungannya dengan satuan keamanan swasta yang disewa oleh perusahaan ekstraktif; dalam kasus lain, polisi atau satuan militer pemerintah merupakan terduga pelaku pelanggaran HAM.

Ketika pertambangan beroperasi di negara-negara dengan tata kelola yang lemah, atau di wilayah yang terdampak konflik atau rawan, risiko terhadap operasi tambang berikut pekerja dan masyarakat juga akan meningkat. Wilayah semacam itu sering dengan kekerasan bersenjata, tindakan kriminal, dan pelanggaran HAM berat atau meluas, termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender, dan, dalam beberapa kasus, penculikan atau pembunuhan karyawan perusahaan.

Pertambangan yang berada di wilayah terdampak konflik mungkin dipaksa melakukan pembayaran kepada pasukan bersenjata atau anasir kriminal, yang mengakibatkan perusahaan terlibat dalam tindakan ilegal atau pelanggaran HAM. Dalam beberapa kasus, kehadiran sebuah pertambangan itu saja, dengan dampak dan keuntungan yang nyata atau yang berupa persepsi, bisa menciptakan atau memperparah konflik antar- atau intramasyarakat di lingkungan yang sudah rawan dan rapuh. Mengingat tingginya risiko bagi perusahaan, pekerja, dan masyarakat lokal, kini sudah menjadi ekspektasi global bahwa bisnis yang beroperasi di wilayah terdampak konflik atau rawan melakukan uji tuntas dan mitigasi untuk menghindari diri agar tidak ikut berkontribusi pada konflik, ketidakamanan, dan pelanggaran HAM ketika beroperasi di wilayah tersebut (Lihat juga D.01).

Pemerintah mengemban tanggung jawab utama untuk menjaga hukum dan ketertiban, serta melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga. Namun di beberapa wilayah, penegakan hukum yang lemah membuat masyarakat rentan mengalami pelanggaran. Terlepas dari apakah pemerintah di negara-negara produsen menunaikan tugas untuk melindungi hak asasi manusia warganya, terdapat ekspektasi global bahwa perusahaan harus menghormati hak

asasi manusia di keseluruhan operasinya (Lihat D.01). Hal ini mencakup mengambil tindakan untuk mencegah keterlibatan dalam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan, seperti satuan keamanan publik atau swasta yang melindungi aset perusahaan.

Pada 2000, Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia disusun melalui prakarsa multipemangku kepentingan untuk memberikan panduan khusus bagi industri ekstraktif dalam menjaga keselamatan dan keamanan operasi mereka di dalam kerangka operasional yang mendorong penghormatan terhadap HAM. Prinsip-prinsip sukarela ini mendorong perusahaan untuk, di antaranya: menilai risiko yang berkaitan dengan keamanan, potensi kekerasan, catatan hak asasi manusia dari penyedia jasa keamanan, aturan hukum, konflik dan transfer peralatan; berkonsultasi dengan masyarakat dan mengomunikasikan pengaturan keamanan; memastikan penempatan dan perilaku satuan keamanan yang tepat; melaporkan atau menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM; dan melatih satuan keamanan dan memperkuat institusi negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Beberapa perusahaan mengadakan kontrak dengan satuan keamanan swasta atau menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan satuan keamanan publik untuk menjelaskan peran, tugas, dan kewajiban masing-masing menyangkut penyediaan jasa keamanan. Prinsip-prinsip sukarela menganjurkan agar perusahaan mendorong pemerintah untuk membuat informasi tentang pengaturan keamanan transparan dan dapat diakses oleh publik, kecuali informasi yang dapat menimbulkan ancaman keamanan, keselamatan, atau hak asasi manusia, dan dalam upaya meningkatkan transparansi serta membangun kepercayaan dengan masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan. Selain itu, beberapa perusahaan ekstraktif telah mulai mengungkapkan secara publik MOU mereka dengan satuan keamanan publik.

Meskipun tidak wajib, uji tuntas ekstra di wilayah terdampak konflik dan dalam manajemen pengaturan keamanan semakin gencar didukung oleh pemerintah dan diadopsi oleh perusahaan tambang yang menyadari bahwa manajemen konflik, keamanan, dan hak asasi manusia yang cermat dapat berkontribusi pada: pemeliharaan reputasi dan izin sosial perusahaan untuk terus beroperasi; peningkatan akses ke pendanaan; penurunan penangguhan produksi; dan rendahnya risiko pelanggaran HAM dan litigasi.

<p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengintegrasikan HAM ke manajemen petugas keamanan dan satuan pengamanan swasta, sejalan dengan Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan HAM.</p> <p><i>Di tingkat korporat, dapatkah perusahaan Anda menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meninjau latar belakang petugas keamanan dan satuan pengamanan swasta yang akan dipekerjakan, terutama terkait dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, agar tidak mempekerjakan individu yang secara kredibel terlibat dalam pelanggaran HAM dalam memberikan layanan keamanan? Hal berikut diperlukan untuk petugas keamanan dan satuan pengamanan swasta, termasuk melalui ketentuan kontrak dengan penyedia jasa keamanan untuk menyelidiki dan melaporkan semua kasus kekerasan fisik dan untuk memberikan bantuan medis kepada individu yang terluka, termasuk kepada pelanggar? Melakukan investigasi terhadap semua perilaku yang melanggar hukum atau kekerasan terhadap pekerja atau masyarakat terdampak yang terkait dengan petugas keamanan dan satuan pengamanan swasta, dan mengambil tindakan disipliner yang tepat?
<p>Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendorong pendidikan dan pelatihan bagi petugas keamanan, satuan pengamanan publik dan swasta, untuk mencegah pelanggaran HAM yang sejalan dengan Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan HAM.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan sepanjang kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mendorong pendidikan dan pelatihan bagi petugas keamanan, satuan pengamanan publik dan swasta, untuk mencegah pelanggaran HAM? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mendorong pendidikan dan pelatihan bagi petugas keamanan, satuan pengamanan publik dan swasta, untuk mencegah pelanggaran HAM? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mendorong pendidikan dan pelatihan bagi petugas keamanan dan satuan pengamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran HAM?
<p>Tindakan</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melakukan uji tuntas lanjutan untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah, dan mengurangi risiko bagi pekerja dan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kehadiran operasi tambang di wilayah terdampak konflik dan berisiko tinggi (CAHRAs) mana pun, sejalan dengan Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan HAM.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja dan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kehadiran mereka di wilayah yang terdampak konflik dan berisiko tinggi? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mengatasi risiko yang sudah teridentifikasi ini? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?

D.03 Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Pertambangan merupakan industri yang menantang secara teknis, meskipun konon mengelola hubungan yang kompleks dengan masyarakat dan pemangku kepentingan bahkan lebih sulit daripada mengeluarkan bahan-bahan tambang dari bumi. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan beragamnya para pemangku kepentingan atas setiap proyek pertambangan, meliputi perempuan, laki-laki, generasi muda, anak-anak, kelompok rentan atau marginal, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan khusus, dan lain-lain. Selain itu, mereka sering memiliki pendapat, dan kepentingan, yang sangat berbeda terhadap potensi keuntungan dan dampak yang berkaitan dengan pertambangan.

Banyak perusahaan tambang, pemerintah, dan lembaga keuangan internasional menyadari bahwa menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terdampak oleh atau tertarik pada proyek pertambangan dapat meningkatkan identifikasi dan manajemen risiko lingkungan dan sosial, serta viabilitas proyek jangka panjang. Dari perspektif perusahaan tambang, tujuan utama keterlibatan pemangku kepentingan adalah untuk membangun dan memelihara hubungan yang konstruktif dengan beragam pemangku kepentingan sepanjang siklus hidup pertambangan. Namun upaya menjalin hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, saling menghormati, dan pemahaman membutuhkan waktu dan keahlian. Karena alasan inilah, banyak perusahaan tambang mulai melibatkan pemangku kepentingan sejak tahap awal pengembangan proyek, dan merekrut staf profesional yang khusus bertugas menjalankan proses pelibatan tersebut dengan pengawasan dan sumber daya manajemen yang sesuai.

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan sebuah proses yang aktif dan berlangsung terus-menerus, yang, tergantung pada proyek pertambangan dan tahap pengembangan tambang, bisa melibatkan elemen-elemen berikut: analisis pemangku kepentingan dan rencana pelibatan pemangku kepentingan; pengungkapan dan penyebarluasan informasi; konsultasi yang berkaitan dengan risiko, dampak, strategi mitigasi, dan keuntungan proyek; partisipasi masyarakat dalam pemantauan proyek; mekanisme untuk mengadukan keluhan dan menjamin penyelesaian (Lihat D.12); dan pelaporan ke pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak.

Partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam berbagai penilaian dampak merupakan kunci untuk memastikan bahwa kepentingan, perhatian, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan yang berbeda-beda, khususnya masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek pertambangan, dipertimbangkan secara memadai oleh perusahaan tambang. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penilaian dampak akan terasa sangat membantu ketika masyarakat dibekali dengan informasi yang tepat waktu dan utuh untuk memudahkan mereka memberikan masukan yang sesuai kepada perusahaan.

Keterlibatan yang bermakna berpeluang besar akan terjadi ketika perusahaan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk merancang proses pelibatan yang tepat secara budaya dan dapat diakses, membangun kapasitas pemangku kepentingan, dan menghilangkan kendala bagi partisipasi. Secara khusus, perhatian perlu diberikan pada pelibatan partisipasi kelompok-kelompok yang mungkin terdampak secara tidak semestinya oleh aktivitas perusahaan, seperti kaum perempuan, generasi muda, para penyandang disabilitas, dan kelompok marginal atau rentan di dalam masyarakat yang terdampak. Selain itu, keterlibatan anak-anak seyogianya tidak diabaikan karena mereka dapat memberikan perspektif yang unik tentang pengalaman, kerentanan, minat/ kepentingan, dan aspirasi mereka. Namun perhatian sebaiknya diberikan pada kapan keterlibatan langsung dengan anak-anak itu penting versus kapan keterlibatan dengan para pembela hak anak dan kelompok pemangku kepentingan hak anak menjadi lebih tepat.

Pelibatan pemangku kepentingan yang efektif menciptakan peluang dialog dua arah sehingga para pemangku kepentingan merasa didengar dan dapat mengeksplorasi penanganannya keprihatinan mereka bersama perusahaan. Umpan balik semacam itu dapat membantu perusahaan melacak efektivitas upaya pelibatan dan memberikan wawasan tentang peluang penyempurnaan proses mereka dari waktu ke waktu.

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang bermakna, proaktif, dan inklusif yang mencakup peluang dialog dan umpan balik dapat membantu sebuah perusahaan mendapatkan dan mempertahankan izin sosial untuk beroperasi dan mengurangi konflik, sehingga menghindari risiko reputasi dan biaya yang berpeluang terjadi jika keprihatinan pemangku kepentingan tidak diidentifikasi dan diatasi secara memadai. Hal tersebut juga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dan merundingkan perjanjian; memperbaiki profil risiko perusahaan; dan meningkatkan akses ke permodalan dengan syarat-syarat yang lebih mudah

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memudahkan partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memudahkan partisipasi:

- a. Perempuan dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka?
- b. Pemuda dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka?
- c. Penyandang disabilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka?

Efektivitas

Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas hubungannya dengan masyarakat terdampak.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan sepanjang kurun waktu yang berurutan, tentang kualitas hubungannya dengan masyarakat terdampak?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan menjaga hubungan saling percaya dengan masyarakat terdampak?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna membangun dan menjaga hubungan saling percaya dengan masyarakat terdampak?

D.04 Viabilitas Ekonomi dan Sosial

Proyek-proyek pertambangan berpotensi mengubah watak ekonomi dan sosial masyarakat yang terkena dampak, masyarakat di sekitarnya, dan daerah asal pekerjaannya. Viabilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pertambangan dapat ditingkatkan melalui penciptaan peluang usaha seperti kontrak pengadaan serta penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

Jumlah pekerjaan yang langsung terkait tambang yang tersedia bagi pekerja lokal bisa tergolong besar, tetapi kebanyakan pekerjaan tersebut bersifat sementara, hanya berjalan selama tahap konstruksi. Selama tahap ekstraksi mineral, pekerjaan menjadi semakin terspesialisasi, dan tanpa pelatihan yang memadai pekerjaan tersebut bisa jatuh ke tangan pekerja terampil dari luar masyarakat lokal atau negara produsen. Keuntungan yang biasanya lebih signifikan dan berumur panjang adalah pemerolehan pasokan barang dan jasa dari perusahaan lokal; pengadaan dari masyarakat lokal, terutama ketika didukung oleh upaya-upaya strategis untuk memperkuat pengembangan kewirausahaan dan usaha lokal, dapat mengubah perekonomian lokal, membangun kecakapan, dan menciptakan peluang kerja, termasuk bagi kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang kecil kemungkinannya mendapatkan pekerjaan di pertambangan. (Lihat A.02 untuk uraian tentang keuntungan mendukung peluang pengadaan bagi pemasok nasional dan wilayah yang lebih besar). Perusahaan tambang semakin giat melaporkan proses dan kinerja pengadaan lokal mereka, dan upaya-upaya pun terus ditempuh untuk mendorong lebih banyak pelaporan di tingkat lokasi tambang agar dapat mendukung perusahaan mengelola pengadaan lokal dan mematangkan serta memberdayakan pemasok, masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan yang lain.

Jika tidak dikelola sebagaimana mestinya, masuknya pendapatan baru dan masuknya pekerja dan pendatang lainnya dapat mengancam integritas sosial dan budaya masyarakat, menciptakan konflik sosial, menimbulkan pelanggaran HAM, dan mengacaukan aktivitas ekonomi tradisional serta layanan ekologis yang menjadi andalan masyarakat.

Penilaian dampak sosial adalah alat penting untuk mengurangi dampak potensial dan meningkatkan prospek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan

proyek-proyek tambang. Penilaian dampak sosial adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus untuk mengidentifikasi pola perubahan kesejahteraan sebuah masyarakat, atau kelompok tertentu di dalam masyarakat, sebagai akibat dari proyek tambang, dan kemudian mengembangkan strategi untuk menghindari, memitigasi, dan mengatasi dampak di sepanjang siklus hidup pertambangan. Penilaian ini berpotensi besar menghasilkan informasi yang tepercaya dan strategi jangka panjang yang mampu bertahan apabila penilaian ini dimulai sejak dini dalam siklus proyek pertambangan, dan ditempuh sebagai upaya kolaboratif antara perusahaan dengan masyarakat terdampak dan pekerja, dengan memastikan partisipasi kaum perempuan, generasi muda, dan anak-anak atau para pembela hak anak (Lihat D.03), serta kelompok-kelompok yang lain.

Dalam beberapa kasus, perusahaan tambang menilai dampak potensial terhadap HAM sebagai bagian dari penilaian dampak sosial (atau bagian dari penilaian dampak lingkungan dan sosial terpadu). Jika tidak dilakukan, penilaian risiko terhadap HAM ini perlu dilakukan sebagai aktivitas yang berdiri sendiri (Lihat D.01), karena bila hal ini tidak dilakukan maka risiko penting terhadap viabilitas sosial bisa terabaikan. Dalam kedua kasus tersebut pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek sosial-ekonomi dan masalah HAM, tanah, dan lingkungan sangat penting untuk mencegah bahaya dan membatasi risiko, di luar batas investasi masyarakat dan sosial.

Strategi untuk mengurangi dampak dan meningkatkan viabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang muncul dalam banyak bentuk. Beberapa perusahaan tambang mengembangkan kebijakan atau perjanjian kerja dengan masyarakat yang melibatkan target perekrutan lokal, pelatihan dan peluang kenaikan karier yang difokuskan pada pembinaan para profesional pertambangan lokal dan dukungan pengembangan kecakapan yang lebih luas (Lihat A.04), atau prakarsa lain seperti alih keterampilan atau program pembiayaan mikro untuk merangsang dan melakukan diversifikasi perekonomian lokal. Kebijakan, perjanjian, dan prakarsa tersebut dapat membantu memastikan masyarakat lokal mampu memetik manfaat jangka panjang dari peluang kerja baik langsung maupun tidak langsung, berikut layanan atau infrastruktur yang terbangun sebagai buah dari pengembangan pertambangan. Namun kebijakan dan program ketenagakerjaan sering tidak berhasil memberikan manfaat yang adil bagi semua segmen masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, beberapa strategi secara khusus membidik generasi muda, perempuan, dan kelompok yang berpotensi termarginalkan atau rentan lainnya, termasuk Masyarakat Adat.

Penilaian dampak sosial dan prakarsa ekonomi berpotensi besar memberikan keuntungan sosial dan ekonomi jangka panjang ketika keduanya dikembangkan melalui proses yang inklusif dan partisipatif, menghadirkan transparansi terkait syarat dan ketentuan, dan menyertakan ketentuan untuk memantau dan mengevaluasi (M&E) proses, hasil, dan dampak. Para pemangku kepentingan lokal sering memiliki kriterianya sendiri dalam mengukur kesuksesan atau kegagalan

kebijakan dan prakarsa sosial dan ekonomi, dan akibatnya, program M&E yang melibatkan masyarakat secara langsung lebih berpeluang besar untuk menumbuhkan kepercayaan pada proses dan meningkatkan kredibilitas serta efektivitas capaian sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Ketika direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, prakarsa sosial dan ekonomi terkait tambang dapat meningkatkan prospek ekonomi baik untuk saat ini maupun dalam jangka panjang serta kesejahteraan sosial masyarakat yang terdampak tambang. Hal ini pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tambang dengan mendukung angkatan kerja yang lebih sehat dan meningkatkan produktivitas pertambangan, memperkuat hubungan masyarakat dan reputasi perusahaan, mendapatkan dan mempertahankan izin sosial untuk beroperasi, dan mengurangi konflik yang dapat mengakibatkan penangguhan atau penutupan proyek

Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mendorong kewirausahaan lokal dan mendukung pengembangan bisnis lokal, termasuk bagi perempuan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none">Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan kewirausahaan dan bisnis lokal?Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melibatkan secara aktif perempuan dalam strategi dan rencana tersebut?Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?
Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mengembangkan peluang pengadaan lokal, termasuk bagi perempuan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none">Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan peluang pengadaan lokal?Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melibatkan secara aktif perempuan dalam strategi dan rencana tersebut?Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?
Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap perempuan, generasi muda, dan anak-anak.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:</i></p> <ol style="list-style-type: none">Melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap perempuan?Melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap generasi muda?Melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap anak-anak?

D.05 Pemanfaatan Lahan

Operasi pertambangan biasanya melibatkan perubahan lahan yang meluas. Pertambangan sering diusulkan dan dibangun di wilayah-wilayah dengan pemanfaatan lahan yang sudah lama mapan, seperti pertanian, berburu dan meramu sesuai tradisi untuk mendapat hewan dan tanaman, aktivitas budaya, rekreasi, konservasi, atau pemukiman manusia. Hal ini dapat menciptakan konflik, misalnya, ketika perusahaan menerima konsesi penambangan mineral sedangkan individu atau masyarakat bersangkutan tidak menyetujuinya dan tidak pula mendapatkan alternatif lahan yang sesuai ataupun peluang untuk memanfaatkan lahan secara bersama.

Di beberapa negara, masyarakat mungkin tidak memiliki bukti tertulis kepemilikan lahan yang sudah mereka manfaatkan secara kolektif selama ratusan tahun sesuai dengan hukum adat. Seperti yang ditekankan di Pedoman Sukarela PBB tentang Tata Kelola Tenurial atas Tanah, Perikanan, dan Kehutanan dalam konteks Ketahanan Pangan Nasional (VGGT). Lahan dan sumber daya masyarakat ini terlebih-lebih rentan diambil alih oleh pemerintah, perusahaan, atau pihak tertentu tanpa tersedianya pengamanan yang memadai bagi orang-orang yang menggantungkan makanan, sumber mata pencaharian, atau kelangsungan budaya mereka pada lahan dan sumber daya tersebut.

Sebagian konflik yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan bisa dihindari atau diminimalkan jika proses kolaboratif dan inklusif antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal ditempuh untuk mengembangkan strategi pemanfaatan lahan regional atau perencanaan skala-lanskap. Proses semacam itu bisa mengeksplorasi opsi seperti pengembangan pemanfaatan lahan untuk aneka jenis dan urutan penggunaan untuk mengelola pemanfaatan lahan yang bersaing, mendorong pemeliharaan lingkungan, dan memaksimalkan keuntungan ekonomi dan sosial bagi generasi saat ini dan yang akan datang (Lihat juga F.01). Selain itu, perjanjian pemanfaatan lahan bersama dapat dikembangkan untuk memberikan akses bagi pembangunan tambang sambil tetap mendukung kemampuan individu dan masyarakat untuk menggunakan dan menikmati lahan mereka semaksimal mungkin, bebas dari campur tangan atau gangguan yang tidak wajar.

Perusahaan juga dapat berupaya meminimalkan jejak fisik operasi pertambangan mereka, dan melepas bagian-bagian dari area pertambangan yang sudah tidak lagi dibutuhkan. Hal ini membantu menghindari situasi ketika perusahaan menguasai area besar lahan secara tidak wajar. Sejumlah negara produsen memiliki regulasi menyangkut penyerahan kembali secara rutin lahan sewa di sepanjang siklus operasi pertambangan. Dengan jejak fisik yang minimal dan menghindari dampak buruk yang berat terhadap pemanfaatan lahan dan aksesibilitas lahan, perusahaan dapat memitigasi risiko konflik terkait lahan dan mendukung pemanfaatan lahan dan sumber mata pencaharian berbasis lahan oleh masyarakat lokal dengan lebih baik.

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi, menilai, mencegah, dan mengurangi dampak buruk terhadap pemanfaatan lahan dan akses lahan oleh masyarakat yang terdampak.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai dampak buruk aktivitasnya terhadap pemanfaatan lahan dan akses lahan oleh masyarakat yang terdampak?
- b. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna meminimalkan dan mengurangi dampak buruk ini?
- c. Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?

D.06 Kesehatan Masyarakat

Aktivitas pertambangan bisa menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat dalam beragam cara. Efek samping kesehatan bisa timbul akibat terpapar oleh kebisingan terkait tambang, zat kontaminan di udara, air, atau tanah, atau akibat rusaknya jasa lingkungan. Faktor-faktor nonlingkungan seperti lalu lintas, masuknya pekerja migran, atau pengaturan keamanan tambang juga dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Risiko kesehatan masyarakat yang khususnya berkaitan dengan operasi pertambangan akan berbeda bergantung pada lokasi tambang dan mineral yang ditambang. Misalnya, proyek pertambangan di wilayah yang terdampak konflik bisa menimbulkan tekanan tambahan pada sumber daya lokal yang langka dan memperburuk masalah kesehatan yang ada. Selain itu, mungkin juga ada kelompok-kelompok rentan yang terdiri dari perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, Masyarakat Adat, dan para penyandang disabilitas yang lebih rentan terhadap risiko kesehatan tertentu. Anak-anak, lantaran perkembangannya yang masih terus berjalan dan belum sempurna, perilaku tangan-masuk-mulut, waktu yang banyak dihabiskan di luar rumah, dan faktor lain, khususnya rentan terhadap pencemaran udara dan kontaminan terkait tambang yang bisa ditemukan di tanah atau air.

Perusahaan dapat bekerja sama dengan masyarakat terdampak dan para pemangku kepentingan yang lain seperti pemerintah lokal dan para profesional kesehatan publik untuk menilai dampak potensial operasi pertambangan terhadap kesehatan masyarakat, dan mengembangkan strategi serta rencana untuk mengelola dan memantau risiko dan dampak yang sudah teridentifikasi. Karena kesehatan masyarakat sering dikaitkan dengan permasalahan lingkungan dan sosial, penilaian kesehatan masyarakat pun dapat diintegrasikan ke dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial (Lihat F.01 dan D.04). Keterlibatan pemangku kepentingan di dalam penilaian kesehatan masyarakat sangat penting bagi efektivitas proyek, karena hal tersebut meningkatkan kualitas data kesehatan, dan membantu mengidentifikasi cara-cara yang dapat diterima dalam memantau dan mengurangi dampak kesehatan masyarakat.

Pemantauan kesehatan masyarakat mencermati dampak positif dan negatif operasi tambang terhadap kesehatan masyarakat, dan dapat memberikan peringatan dini adanya masalah kesehatan di tingkat masyarakat. Pemantauan meliputi capaian kesehatan, seperti insidensi malnutrisi, penyakit, atau gangguan kesehatan mental, maupun penentu kesehatan, seperti kadar pencemaran udara, air, dan tanah. Perusahaan tambang semakin giat bermitra dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam memantau kesehatan masyarakat dan memantau komitmen lingkungan dan sosial secara lebih umum.

Meskipun kesehatan masyarakat pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah negara produsen, perusahaan tambang dapat, bilamana dipandang tepat, mengambil peran pendukung yang proaktif dalam mengembangkan peluang yang melengkapi kapasitas pemerintah, terutama di negara-negara berkembang yang mungkin kekurangan layanan kesehatan lokal. Investasi perusahaan tambang di dalam prakarsa kesehatan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur untuk menyediakan air bersih dan sanitasi atau kampanye kesehatan terkait penyakit dengan beban biaya tinggi, dapat menciptakan manfaat kesehatan yang sangat positif. Namun sikap hati-hati harus dilakukan untuk memastikan agar setiap prakarsa atau infrastruktur kesehatan masyarakat yang penting didukung oleh perusahaan memang sejalan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, dan dapat dilanjutkan pascapenutupan tambang (Lihat C.03).

Risiko dan dampak kesehatan, baik terhadap pekerja tambang maupun orang-orang yang tinggal di dekat proyek pertambangan, merupakan salah satu masalah yang paling penting bagi masyarakat lokal, dan menuntut perhatian ekstra oleh perusahaan tambang. Pendekatan proaktif untuk meminimalkan dampak kesehatan dan memaksimalkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan kinerja keuangan dan sosial perusahaan; menurunkan risiko munculnya tuntutan kewajiban dan litigasi oleh masyarakat; meningkatkan akses ke pendanaan internasional; mengurangi ketidakhadiran dan biaya perawatan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat lokal; dan meningkatkan semangat kerja pekerja dan hubungan masyarakat secara umum.

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi, menilai, mencegah, dan mengurangi dampak aktivitas mereka terhadap kesehatan masyarakat.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melaksanakan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitasnya terhadap kesehatan masyarakat?
- b. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mengatasi dampak tersebut?
- c. Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?

D.07 Kesetaraan Gender

Industri pertambangan menciptakan lapangan kerja serta peluang dan manfaat ekonomi; namun laki-laki lebih berpeluang besar daripada perempuan untuk dipekerjakan langsung dalam operasi pertambangan. Selain itu, laki-laki lebih berpeluang besar memetik keuntungan dari program dan proyek sosial yang didukung oleh perusahaan tambang.

Perempuan, pada sisi lain, sering menanggung beban risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak wajar terkait dengan pertambangan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual, penganiayaan, dan eksploitasi seksual yang melibatkan perempuan dan anak perempuan tergolong marak di beberapa wilayah pertambangan. Terlebih lagi, di beberapa masyarakat, kaum perempuan bertanggung jawab menyediakan makanan dan air bersih untuk keluarga mereka sehingga hilangnya akses ke lahan yang subur dan air bersih akibat aktivitas pertambangan bisa menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi mereka. Namun perempuan dan anak perempuan sering kali kurang terwakili di dalam proses pelibatan pemangku kepentingan pertambangan (Lihat D.03), yang mengaburkan informasi yang diterima oleh perusahaan menyangkut kepentingan dan prioritas masyarakat. Di dalam proses pengambilan keputusan masyarakat, perempuan pun bisa jadi terpinggirkan, sehingga suara mereka tidak banyak didengar ketika mereka menyampaikan pendapat tentang pola penanganan dampak atau alokasi sumber daya dari pertambangan.

Sebuah praktik baru adalah penggunaan penilaian dampak gender untuk mengidentifikasi dampak dari proyek-proyek pertambangan terhadap perempuan dan laki-laki (dan hubungan di antara keduanya), untuk mengembangkan strategi mitigasi dampak, dan untuk mendorong pemberdayaan dan partisipasi perempuan. Misalnya, penilaian dampak gender dapat membantu mengidentifikasi hambatan bagi partisipasi perempuan dan anak perempuan di dalam penilaian, pemantauan, dan pengambilan keputusan terkait proyek. Melalui pengembangan kapasitas seperti pelatihan dalam berunding, komunikasi, atau pengumpulan data dan pemantauan, perempuan dapat memperoleh kecakapan yang dapat ditransfer ke dalam situasi kehidupan yang lain. Penilaian dampak gender juga dapat membantu membedakan antara perbedaan dampak, kebutuhan, dan kepentingan dari sisi usia, dengan melibatkan anak perempuan dan anak laki-laki di dalam penilaian.

Perhatian lebih besar juga sedang dicurahkan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek-proyek pertambangan. Gerakan ini telah muncul karena luasnya pengakuan di kalangan badan-badan pembangunan dan perusahaan bahwa pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam keputusan dan perencanaan program sosial menghasilkan mitigasi yang lebih baik terhadap dampak buruk yang mungkin muncul serta penurunan angka kemiskinan dan hasil pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Pada tahun-tahun terakhir, sektor keuangan telah menyoroiti masalah ketidakadilan gender di sektor pertambangan. Akibatnya, beberapa perusahaan mulai menciptakan lebih banyak peluang bagi perempuan di tingkat direksi perusahaan dan manajemen senior (Lihat B.02) dan dalam aktivitas pertambangan inti. Namun beragam tantangan terus muncul bagi pekerja tambang perempuan, seperti pelecehan seksual, kurangnya penerimaan oleh rekan kerja laki-laki, kendala fisik, kurangnya fasilitas atau alat pelindung diri yang sesuai gender, menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan kerja giliran, dan lain-lain.

Berbagai tantangan di atas meningkat jika gender bersilangan dengan faktor lain seperti diskriminasi akibat status sosio-ekonomi, usia, ras, asal-usul, atau orientasi seksual. Diperlukan pendekatan yang lebih sadar-gender terhadap manajemen risiko, termasuk pelibatan pekerja perempuan dalam penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja serta upaya lebih besar untuk menciptakan kondisi kerja yang ramah-keluarga demi melindungi pekerja perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pertambangan

Perusahaan tambang yang menempuh pendekatan adil-gender dalam hal ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penilaian dampak, dan keterlibatan berpeluang meraih produktivitas yang lebih baik dalam operasi tambang, hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, dan potensi konflik yang lebih rendah, sedangkan perempuan dan masyarakatnya akan merasakan peluang ekonomi dan manfaat pembangunan yang lebih besar. Jika digabung, faktor-faktor di atas dapat menghasilkan keuntungan keuangan dan reputasi bagi perusahaan.

Efektivitas

Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan sepanjang kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan, termasuk data terpilah lokasi tambang tentang pelaksanaan rutin dari proses penilaian dampak gender?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan?

D.08 Masyarakat Adat

Tidak ada satu definisi resmi tentang Masyarakat Adat, meskipun identifikasi diri merupakan salah satu kriteria utama untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat. Lazim dipahami juga bahwa budaya dan sumber mata pencaharian dari banyak Masyarakat Adat erat berkaitan dengan wilayah nenek moyang dan sumber daya alam di sekelilingnya. Akibatnya, industri ekstraktif seperti pertambangan, yang sering mengubah dan merusak tanah dan sumber daya alam secara besar-besaran,

menimbulkan potensi dampak buruk yang tinggi, dan mungkin memporandakan kehidupan, sumber mata pencaharian, dan budaya Masyarakat Adat. Masyarakat Adat semakin sering menjadi objek serangan dan tindak kekerasan, kriminalisasi, dan ancaman di dalam konteks proyek skala besar, termasuk proyek industri ekstraktif.

Kini sudah menjadi norma yang diakui secara global bahwa perusahaan harus menghormati hak-hak asasi manusia yang terdampak oleh aktivitasnya (Lihat D.01). Masyarakat Adat memiliki hak individual dan kolektif yang bisa terdampak oleh pengembangan proyek pertambangan skala besar, termasuk hak untuk berpartisipasi, menentukan nasib sendiri, dan mengejar prioritas mereka sendiri untuk mengembangkan sumber daya alam, hingga hak yang berkaitan dengan harta benda, budaya, agama, dan kesehatan.

Banyak perusahaan tambang menyadari perlunya menghormati hak dan kepentingan Masyarakat Adat, termasuk hak mereka akan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Lihat D.09). Sudah lazim disepakati bahwa hubungan antara perusahaan dengan Masyarakat Adat seyogianya didasarkan pada penghormatan, keterlibatan penuh makna, dan keuntungan timbal-balik. Perusahaan tambang terkemuka tentu akan menyusun pedoman dan kebijakannya sendiri untuk mengelola aktivitas dan keterlibatan dengan Masyarakat Adat, yang disesuaikan dengan konteks khusus kelompok adat yang berpotensi terdampak oleh operasi dan aktivitas mereka.

Perusahaan yang mencoba beroperasi di dalam atau di dekat kawasan adat bisa mulai membangun kepercayaan dengan Masyarakat Adat dengan merintis pelibatan awal dan inklusif (Lihat D.03) dengan semua kelompok yang berpotensi terdampak, seperti suku, bangsa, dan kelompok Masyarakat Adat. Setiap kelompok Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh proyek pertambangan atau fasilitas kaitannya, seperti bendungan limbah tambang, jalan, atau smelter, seyogianya ikut serta dalam mengidentifikasi dan menilai dampak potensial aktivitas terkait tambang terhadap hak dan kepentingan mereka. Untuk memastikan integritas dan keandalan keterlibatan jangka panjang, perusahaan dianjurkan untuk mengambil langkah-langkah matang untuk memperbaiki ketimpangan kekuasaan yang besar dan mengatasi hambatan bagi partisipasi yang bermakna. Pelibatan Masyarakat Adat yang tepat juga akan didasarkan pada akses penuh ke informasi tentang potensi dampak lingkungan dan sosial, viabilitas teknis dan keuangan dari proyek yang diusulkan, serta manfaat keuangan potensial.

Jika proyek berlanjut, pertambangan yang bertanggung jawab menuntut perusahaan agar bekerja sama dengan Masyarakat Adat untuk mengembangkan strategi mitigasi yang dapat diterima, dan melibatkan mereka dalam pemantauan proyek jangka panjang. Perusahaan juga dapat menunjukkan penghormatan pada Masyarakat Adat dengan berupaya memahami dan melindungi nilai-nilai warisan budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kepercayaan, bahasa,

adat-istiadat, praktik, dan identitas mereka, serta memastikan semua karyawan perusahaan memahami tanggung jawab mereka untuk menghormati hak dan warisan budaya Masyarakat Adat.

Masyarakat Adat di seluruh dunia terus menentang proyek-proyek industri ekstraktif karena alasan-alasan sosial, budaya, dan lingkungan yang bisa dimaklumi. Perusahaan yang memiliki rekam jejak bekerja sama dengan Masyarakat Adat dengan sikap menghormati, mengakui legitimasi keprihatinan mereka, lebih kecil kemungkinannya menghadapi konflik, penangguhan, dan kendala dalam berunding dan menuntaskan perjanjian. Hal ini meliputi penerimaan keinginan Masyarakat Adat meskipun tidak ditemukan perjanjian.

Tindakan

Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu merancang dan mengimplementasikan, melalui partisipasi yang inklusif, strategi dan rencana untuk menghormati hak, kepentingan, dan kebutuhan Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh operasi pertambangan, sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu:

- a. Mengidentifikasi, melalui partisipasi yang inklusif, semua Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas kaitannya?
- b. Mengidentifikasi, melalui partisipasi yang inklusif, hak, kepentingan, dan kebutuhan Masyarakat Adat ini?
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dan rencana, melalui partisipasi yang inklusif, untuk menghormati hak, kepentingan, dan kebutuhan Masyarakat Adat ini?

Efektivitas

Jika memungkinkan, perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat serta menghindari dampak buruk terhadap mata pencaharian dan warisan budaya mereka.

Jika memungkinkan, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan data, sepanjang kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas terkait, serta untuk menghindari dampak buruk terhadap mata pencaharian dan warisan budaya mereka?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau, berdasarkan patokan dan/atau target, efektivitas langkah-langkah yang diambilnya dalam menghormati semua hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas terkait, serta untuk menghindari dampak buruk terhadap mata pencaharian dan warisan budaya mereka?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan penyempurnaan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas terkait, serta untuk menghindari dampak buruk terhadap mata pencaharian dan warisan budaya mereka?

D.09 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) adalah prinsip pemberian informasi dan konsultasi sebelum proyek atau pengembangan utama yang bisa menimbulkan dampak terhadap hak dan kepentingan rakyat, serta pemberian peluang persetujuan atau penolakan kolektif terhadap pengembangan tersebut dengan cara-cara yang bebas intimidasi atau paksaan dan mendahului aktivitas yang bersangkutan. FPIC merupakan hak Masyarakat Adat yang diakui secara internasional dan merupakan mekanisme untuk menjamin penghormatan atas hak dan kepentingan mereka.

Pertambangan yang merambah ke wilayah Masyarakat Adat bisa menimbulkan konflik sosial dan memicu dampak yang besar dan sering tidak bisa dipulihkan terhadap nilai budaya, hak, sumber daya, dan sumber mata pencaharian mereka. FPIC menyediakan sarana penting untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan antara Masyarakat Adat dengan aktor dari luar (misalnya, pemerintah atau perusahaan), dan memungkinkan Masyarakat Adat untuk menentukan prioritas pembangunan mereka serta merundingkan keuntungan dan pengamanan di tingkat masyarakat secara lebih efektif. Kini dipahami bahwa ketika usulan eksplorasi atau proyek tambang mungkin berdampak terhadap Masyarakat Adat atau wilayah mereka, perusahaan yang mengajukan proyek membutuhkan persetujuan Masyarakat Adat yang bersangkutan, meskipun tidak diwajibkan demikian oleh undang-undang negara produsen (Lihat C.02).

FPIC dari Masyarakat Adat telah menjadi prasyarat bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan melalui International Finance Corporation dan lembaga keuangan internasional lainnya. Adanya FPIC juga merupakan persyaratan bagi perusahaan yang ikut serta dalam berbagai program sertifikasi sukarela yang didirikan untuk sektor industri ekstraktif seperti perhutanan, minyak sawit, dan pertambangan.

Meskipun FPIC pada mulanya didirikan sebagai hak yang hanya berlaku bagi Masyarakat Adat, prinsip-prinsip FPIC mulai diterapkan secara lebih luas. Sejak 2009, badan regional dan internasional telah mulai menerapkan prinsip-prinsip umum FPIC pada masyarakat dan konstituen yang bukan tergolong masyarakat adat. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan asosiasi industri telah menyatakan dukungan pada penerapan FPIC yang lebih luas. Misalnya, pada 2013 para anggota International Council on Mining and Metals menyatakan pernyataan sikap yang berbunyi, “Jika Masyarakat Adat dan non-adat sama-sama berpeluang terkena dampak secara signifikan, para anggota bisa memilih untuk memperluas komitmen yang tertuang dalam pernyataan sikap ini [termasuk FPIC] ke warga yang bukan masyarakat adat.” Selain itu, pada 2016 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan PBB (CEDAW) menganjurkan agar pemerintah mendapatkan FPIC dari perempuan pedesaan sebelum persetujuan proyek yang memengaruhi tanah dan sumber daya pedesaan.

Pengambilan sikap proaktif terhadap FPIC memberi sinyal kepada pemerintah negara produsen, masyarakat sipil, dan komunitas investasi bahwa perusahaan menghormati hak dan kepentingan Masyarakat Adat dan masyarakat yang terdampak serta berkomitmen kuat untuk membangun hubungan yang positif dengan mereka. Dengan memasukkan FPIC dalam kebijakan perusahaan dan mengimplementasikan FPIC secara sistematis di sepanjang siklus hidup operasi, perusahaan tambang bisa mengurangi risiko konflik, hukum, dan reputasi; membangun hubungan yang positif dengan masyarakat dan izin sosial untuk beroperasi.

Komitmen

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak Masyarakat Adat akan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan untuk mendukung perluasan prinsip FPIC ke kelompok-kelompok lain yang terdampak-proyek.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak Masyarakat Adat akan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan untuk mendukung perluasan prinsip FPIC ke kelompok-kelompok lain yang terdampak-proyek?
- b. Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- c. Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

D.10 Pemindahan dan Pemukiman Kembali

Baik akuisisi lahan oleh perusahaan tambang maupun kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan sama-sama mengakibatkan relokasi fisik (pemindahan) warga, atau pemindahan ekonomi sebagai akibat hilangnya akses ke sumber mata pencaharian, atau lahan atau sumber daya alam yang menghasilkan pendapatan. Jika dilakukan secara buruk, pemindahan fisik dan ekonomi bisa melanggar hak-hak asasi manusia dan mengancam kesehatan serta kesejahteraan sosial, budaya, ekonomi, fisik dan psikologis individu dan masyarakat.

Meskipun pemindahan warga bisa menimbulkan efek yang melumpuhkan, pemindahan dan pemukiman kembali yang dipicu pertambangan (MIDR) sering memunculkan tantangan yang bahkan lebih berat lagi. Proyek-proyek pertambangan sering berada di wilayah-wilayah terpencil dengan pemerintah yang lemah atau tidak stabil, rakyat kekurangan kekuatan politik, penguasaan tanah tidak pasti, dan lahan atau peluang sumber mata pencaharian alternatif terbatas. Penelitian tentang MIDR menunjukkan secara konsisten tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan orang-orang yang dipindah pemukimannya. Baik masyarakat yang menerima warga pindahan maupun masyarakat yang dimukimkan kembali menghadapi risiko konflik, pelanggaran HAM, kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial yang tinggi.

Di beberapa negara, pertambangan skala besar yang diusulkan berpotongan dengan wilayah-wilayah yang secara turun-temurun digunakan untuk pertambangan rakyat atau skala kecil (ASM). MIDR secara khusus bisa menimbulkan dampak yang

sangat parah terhadap masyarakat ASM: ada kemungkinan kesulitan merelokasi penambang ASM karena peluang untuk menekuni sumber mata pencaharian tradisional mereka tidak mudah ditemukan; dan karena banyak penambang ASM secara formal tidak memiliki hak atas tanah dan mineral yang diakui sehingga kemungkinan tidak dapat menerima ganti rugi melalui proses pemukiman kembali atas hilangnya sumber mata pencaharian.

Dengan mempertimbangkan potensi kemiskinan dan konflik yang tinggi, pemindahan dan pemukiman kembali yang dipicu pertambangan sebaiknya hanya dilakukan dalam kondisi di luar kewajaran, dan dengan pengamanan yang cukup untuk memastikan pemeliharaan atau perbaikan standar hidup dan sumber mata pencaharian warga yang terdampak. Namun, meskipun menghindari pemukiman kembali sering dipandang sebagai prioritas utama bagi perusahaan dan lembaga pemberi pinjaman, patut juga disadari bahwa penghindaran tersebut tidak selalu memberikan hasil yang paling positif bagi masyarakat jika mengingat, misalnya, risiko kesehatan dan keselamatan yang besar yang sering ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan di sekitar operasi pertambangan.

Beberapa pengamanan penting yang berkaitan dengan pemukiman kembali meliputi: memprioritaskan penyediaan lahan daripada ganti rugi tunai; mendasarkan semua ganti rugi pada biaya pemindahan secara penuh; menyediakan pilihan opsi bagi pemukiman yang memadai dengan jaminan penguasaan/kepemilikan, terlepas dari ada-tidaknya hak hukum lahan dan aset yang berlaku sebelumnya; memulihkan atau meningkatkan sumber mata pencaharian; dan memungkinkan warga yang dipindahkan untuk ikut menikmati keuntungan proyek tambang.

Yang penting diingat, pertambangan yang bertanggung jawab mensyaratkan agar orang-orang yang kemungkinan terkena dampak sampingan dari pemukiman kembali diizinkan ikut serta dalam semua proses dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemukiman kembali, meliputi: evaluasi alternatif proyek; penilaian dampak; perencanaan langkah-langkah mitigasi; implementasi program pemukiman kembali; dan pemantauan serta evaluasi pemukiman kembali. Agar dapat memastikan partisipasi yang efektif, keterlibatan sebaiknya menyertakan perempuan, generasi muda, kelompok-kelompok rentan termasuk penambang tradisional jika relevan, dan masyarakat yang menerima warga pindahan; dan masyarakat terdampak harus dilengkapi dengan bantuan hukum dan teknis secara gratis. Selain itu, penghormatan atas hak asasi manusia membutuhkan penerapan mekanisme keluhan untuk membantu orang-orang yang terdampak mengadukan keprihatinan dan mencari penyelesaian yang tepat.

Perusahaan tambang dianjurkan untuk mencurahkan waktu dan sumber daya untuk merencanakan program pemukiman kembali secara memadai; dan untuk melakukan pemantauan serta evaluasi eksternal terhadap hasil-hasil pemukiman kembali dengan partisipasi masyarakat yang terdampak untuk memastikan pembuktian komitmen mereka dalam meningkatkan sumber mata pencaharian dan standar

hidup. Kegagalan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat yang terdusur dan dimukimkan kembali akan menciptakan risiko tinggi bagi perusahaan, meliputi konflik yang meningkat, cacatnya reputasi, biaya operasional lebih tinggi, dan berkurangnya akses ke lahan.

Tindakan	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi, menilai, menghindari, dan mengurangi dampak potensial pemindahan fisik dan/atau ekonomi secara paksa terhadap orang-orang yang terdampak proyek.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu:</i></p> <ol style="list-style-type: none">Menilai dampak potensial pemindahan fisik dan/atau ekonomi secara paksa terhadap orang-orang yang terdampak proyek?Mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak negatif?Melibatkan orang-orang yang terdampak proyek ke dalam penilaian dampak dan dalam pengembangan strategi untuk mengatasi dampak tersebut?
-----------------	---

Efektivitas	<p>Jika memungkinkan, perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memastikan perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga menyusul pemukiman kembali secara paksa.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none">Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam memastikan perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga menyusul pemukiman kembali secara paksa?Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi pemukiman kembali secara paksa dengan cara yang menjamin perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga?Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengatasi pemukiman kembali secara paksa dengan cara yang menjamin perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga?
--------------------	--

D.11 Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil

Pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM) sudah ada secara historis di banyak negara, dan menjadi sumber mata pencaharian tetap atau musiman secara turun-temurun bagi banyak sekali orang. ASM bersifat padat karya; cenderung mengeksploitasi deposit permukaan yang mungkin tidak berumur panjang bagi pertambangan skala besar (LSM); sering dikaitkan dengan investasi dan tingkat mekanisasi yang rendah; dan standar kesehatan serta keselamatan yang rendah, dan bisa menimbulkan dampak signifikan bagi lingkungan.

Aktivitas ASM kadang-kadang dipandang secara negatif oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak lain akibat permasalahan seperti pekerja anak-anak dan pekerja paksa (Lihat E.02), potensi pendapatan ASM untuk membiayai aktivitas yang ilegal atau konflik, pencemaran lingkungan, atau kekacauan sosial. Dalam situasi tertentu, muncul konflik antara ASM dengan perusahaan LSM; dalam situasi lain, ketegangan bisa muncul antara penambang ASM dengan masyarakat lokal, terutama jika ASM terbilang baru di wilayah tersebut atau ada sumber daya masyarakat yang terancam oleh operasi ASM.

Namun pertambangan rakyat dan skala kecil merupakan aktivitas yang mengurangi kemiskinan, dan bisa sangat penting bagi masyarakat dan perekonomian lokal ketika tidak banyak dijumpai alternatif sumber mata pencaharian lain yang layak.

Diperkirakan ada 40 juta orang terlibat langsung dalam ASM di seluruh dunia, termasuk anak-anak dan kaum perempuan. Diperkirakan sekitar 150 juta orang bergantung pada ASM secara tidak langsung. Meskipun faktanya pertambangan rakyat itu berisiko dan bersifat padat karya, jumlah komoditas yang ditambang dan jumlah pekerja ASM terus tumbuh pesat.

Risiko konflik dan interaksi dengan kekerasan antara ASM dengan operasi pertambangan skala besar bisa menimbulkan beberapa dampak. ASM bisa menimbulkan risiko reputasi dan investasi serta melemahkan izin sosial perusahaan LSM untuk beroperasi dengan memunculkan permasalahan lingkungan dan kesehatan publik, benturan dengan satuan keamanan pertambangan, berikutan sengketa hak atas tanah dan kepemilikan sumber daya alam. Risiko ini, pada gilirannya, bisa mengancam viabilitas proyek perusahaan LSM saat ini dan yang akan datang. Konsekuensinya, perusahaan LSM dan lainnya tengah berupaya menemukan cara-cara untuk meningkatkan dan mengelola hubungan antara ASM dengan LSM secara saling menguntungkan, dan meningkatkan potensi sektor ASM agar menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi lokal.

Keragaman sektor ASM menjadi kendala bagi solusi tunggal yang cocok untuk semua. Namun ada beberapa upaya menjanjikan yang bisa diterapkan secara strategis oleh perusahaan LSM, yang bergantung pada konteks pertambangan tertentu. Misalnya, keterlibatan penambang ASM dan masyarakat sepanjang tahap-tahap awal pengembangan pertambangan dan di sepanjang siklus hidup proyek dapat membantu meredakan ketegangan di antara kedua sektor. Dalam beberapa kasus, kiranya bermanfaat jika menggunakan fasilitator atau menyepakati aturan main bersama untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan partisipasi efektif oleh semua pihak.

Dalam kondisi tertentu, perusahaan pertambangan skala besar mungkin juga tepat untuk: melibatkan pemerintah untuk membantu memajukan kebijakan yang akan menguntungkan sektor ASM dan mendukung hubungan ASM-LSM; berupaya menciptakan kerangka hukum dan regulasi ASM yang kuat; membantu pengesahan ASM; memberikan sebagian sewa pertambangan LSM kepada ASM membeli bijih

tambang dari penambang ASM; memberikan bantuan teknis kepada penambang ASM; mempekerjakan penambang ASM sebagai subkontraktor; mendorong diversifikasi sumber mata pencaharian; atau mendukung akses bagi penambang ASM dan masyarakat ke layanan dasar. Dasar keterlibatan atau aktivitas pendukungnya harus melibatkan identifikasi dan pemetaan secara inklusif atas individu dan kelompok ASM di sekitar lokasi tambang.

ASM berpotensi memberikan sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi produsen tambang skala kecil. Dengan berfokus pada pembangunan hubungan dan pemberian keuntungan riil melalui prakarsa yang bertarget, perusahaan pertambangan skala besar bisa mengurangi konflik dengan ASM, dan meningkatkan sumber mata pencaharian pekerja ASM dan masyarakat lokal. Semua aktivitas di atas akan memberikan keuntungan reputasi bagi perusahaan, membantu mengurangi risiko, dan berkontribusi bagi tujuan pengentasan kemiskinan (SDG1) dengan menciptakan perekonomian lokal yang lebih kuat dan iklim investasi yang lebih stabil dan menarik di negara-negara produsen

Tindakan

Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan aktivitas pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM) di dalam dan di seputar operasi mereka.

Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang menjalankan aktivitas ASM di seputar operasinya?
- b. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana melibatkan pemangku kepentingan yang teridentifikasi, termasuk melalui pembuatan perjanjian keterlibatan bilamana perlu?
- c. Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?

Tindakan

Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan peluang untuk mendukung program bantuan teknis dan/atau program sumber mata pencaharian alternatif bagi penambang ASM di sekitar operasi tambang mereka.

Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu:

- a. Menilai kebutuhan, dan kelayakan, pemberian dukungan teknis dan/atau sumber mata pencaharian bagi penambang ASM?
- b. Mengembangkan strategi dan rencana berdasarkan penilaian tersebut?
- c. Melibatkan penambang ASM ke dalam penilaian kebutuhan di atas dan dalam pengembangan strategi dan rencana apa pun?

D.12 Keluhan dan Penyelesaian

Pertambangan skala besar berpotensi memengaruhi secara signifikan kehidupan, harta benda, sumber daya lingkungan, dan hak anggota masyarakat di sekitar dan para pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu, pertanyaan, keprihatinan, dan keluhan sudah pasti akan dipicu oleh dampak baik itu nyata maupun sekadar persepsi dari operasi pertambangan.

Mekanisme keluhan tingkat operasional (atau tingkat-proyek) merupakan proses formal yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengadukan keprihatinan dan mencari penyelesaian atas dampak negatif dari aktivitas sebuah perusahaan tambang. Idealnya, mekanisme ini memberikan proses untuk menerima, mengevaluasi, dan menangani keprihatinan kecil dan permasalahan yang lebih besar, termasuk pelanggaran HAM. Namun ketika muncul tuduhan pelanggaran HAM yang serius atau marak, mekanisme keluhan tingkat operasional mungkin bukan merupakan sarana yang tepat untuk memberikan penyelesaian karena hal tersebut mungkin membutuhkan keterlibatan badan-badan negara. Lebih dari itu, pemanfaatan mekanisme keluhan tingkat operasional sebaiknya tidak menghalangi orang yang mengadukan keluhan untuk mengakses mekanisme keluhan yudisial atau nonyudisial.

Mekanisme keluhan tingkat operasional bisa menjadi sarana penyelesaian yang efektif bagi keluhan jika mekanisme tersebut memenuhi kriteria efektivitas yang dijelaskan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kriteria tersebut meliputi legitimasi, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, cocok dengan hak, sumber pembelajaran terus-menerus, dan didasarkan pada keterlibatan dan dialog dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, mekanisme keluhan seyogianya dirancang untuk menjamin penyelesaian keluhan tepat waktu. Jika terjadi insiden yang menimbulkan trauma seperti penganiayaan seksual, mekanisme dan proses penyelesaian sebaiknya dirancang untuk menghindari risiko trauma ulang atas korban yang mengadu.

Penyelesaian yang ditawarkan melalui mekanisme keluhan sebaiknya meredakan atau memberikan kelegaan dari dampak buruk apa pun yang telah terjadi. Namun penyelesaian yang tepat bisa berbeda-beda bergantung pada kondisinya. Misalnya, penyelesaian bisa dalam bentuk permohonan maaf, ganti rugi, rehabilitasi, ganti rugi keuangan atau nonkeuangan, atau langkah-langkah untuk mencegah terulangnya tindakan yang membawa dampak buruk tersebut.

Mekanisme keluhan tingkat operasional tidak akan memenuhi tujuannya yang semestinya jika tidak dimanfaatkan. Dengan melibatkan beragam kelompok pemangku kepentingan yang terdampak ke dalam perancangan, aksesibilitas, dan pelaksanaan mekanisme keluhan, perusahaan tambang dapat membantu memastikan dirinya mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan tepat secara budaya, sehingga meningkatkan peluang bahwa pemangku kepentingan

akan percaya dan memanfaatkan proses mekanisme keluhan, dan bahwa penyelesaiannya efektif dan tepat.

Orang-orang yang mengadu ingin diyakinkan bahwa mereka akan ditangani secara serius, dan diperlakukan dengan adil. Perusahaan tambang dapat menumbuhkan kepercayaan pada proses mekanisme keluhan dengan melibatkan pemangku kepentingan ke dalam pemantauan dan verifikasi kepatuhan pada komitmen yang dilakukan melalui mekanisme keluhan, dan dengan menciptakan banyak peluang bagi pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik terhadap efektivitasnya. Laporan public tentang keluhan, seperti jenis permasalahan yang diadukan, jumlah keluhan, dan proporsi masalah yang terselesaikan yang memuaskan pengadu, dapat membantu menunjukkan bahwa perusahaan menyikapi keprihatinan masyarakat lokal secara serius.

Muncul ekspektasi global yang semakin besar bahwa perusahaan akan menerapkan mekanisme keluhan di tingkat operasional. Jika terbukti efektif, mekanisme tersebut memungkinkan Perusahaan untuk mengidentifikasi keprihatinan kecil sebelum memanas menjadi konflik yang tak terkendali; membantu menghindari protes atau penentangan terhadap proyek pertambangan dan pertikaian hukum yang mahal; dan meningkatkan akses ke pembiayaan proyek. Informasi yang dihasilkan melalui mekanisme keluhan di tingkat operasional juga dapat memfasilitasi pembelajaran yang dapat mendukung manajemen hubungan dengan masyarakat yang lebih baik dalam jangka Panjang.

Efektivitas

Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme keluhannya bagi masyarakat.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan sepanjang kurun waktu yang berurutan, tentang penerapan dan pemanfaatan mekanisme perusahaan terkait penanganan keluhan bagi masyarakat, termasuk jumlah dan sifat keluhan dan tindakan yang diambil sebagai respons?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas mekanisme keluhan bagi masyarakat?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas mekanisme keluhan bagi masyarakat?

Scoring Framework

D.01.1 Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia, sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa perusahaan tersebut memiliki:

A. Meresmikan komitmennya, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan UNGP?

2 poin Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan UNGP dalam dokumen formal yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan dan didukung oleh manajemen senior.

1 poin Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan UNGP dalam dokumen formal yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan, namun tidak ada bukti bahwa komitmen ini didukung oleh manajemen senior.

ATAU

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan UNGP dalam dokumen formal yang disahkan oleh manajemen senior, namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

ATAU

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dalam dokumen formal yang disahkan oleh manajemen senior, namun tidak secara eksplisit mengacu pada UNGP.

0.5 poin Perusahaan mengacu pada perlunya menghormati hak asasi manusia, namun tidak membuat komitmen yang jelas dalam dokumen formal yang didukung oleh manajemen senior.

B. Menugaskan tanggung jawab dan akuntabilitas tingkat manajemen atau dewan direksi untuk melaksanakan komitmen ini?

2 poin Perusahaan memiliki fungsi tingkat manajemen senior dan/atau Dewan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini, dan terdapat informasi rinci mengenai ruang lingkup, peran, dan akuntabilitas aktualnya.

1 poin Perusahaan memiliki fungsi tingkat manajemen senior dan/atau Dewan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini, namun informasi mengenai ruang lingkup, peran, dan akuntabilitas aktualnya terbatas.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2, namun perusahaan mendapat skor 1 di bawah a).

0.5 poin Perusahaan secara singkat menyebutkan fungsi di tingkat manajemen senior dan/atau tingkat Dewan untuk melaksanakan komitmen ini, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2 atau 1, namun perusahaan mendapat skor 0,5 di bawah a).

C. Berkomitmen sumber daya keuangan dan staf untuk melaksanakan komitmen ini?

2 poin Perusahaan memiliki tim tingkat operasional di seluruh perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya penghormatan hak asasi manusia.

ATAU

- Perusahaan menyelenggarakan program dan/atau lokakarya penyadaran dan/atau pelatihan di seluruh perusahaan terkait dengan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia, dan terdapat bukti rinci mengenai sumber daya keuangan dan/atau kepegawaian khusus yang dilakukan
- 1 poin** Perusahaan menyelenggarakan program dan/atau lokakarya penyadaran dan/atau pelatihan di seluruh perusahaan terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun informasi mengenai sumber daya keuangan dan/atau staf aktual yang dilakukan terbatas.
ATAU
Perusahaan memiliki tim tingkat operasional di seluruh perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya penghormatan hak asasi manusia, namun hanya pada beberapa aspek hak asasi manusia yang terbatas
ATAU
Perusahaan mengalokasikan sumber daya keuangan dan staf untuk melaksanakan komitmen ini (program kesadaran/pelatihan/lokakarya dan/atau tim yang bertanggung jawab), namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2, namun perusahaan mendapat skor 1 di bawah a).
- 0.5 poin** Perusahaan memberikan bukti adanya program kesadaran dan/atau pelatihan dan/atau lokakarya terkait penghormatan hak asasi manusia, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.
ATAU
Perusahaan menyebutkan adanya program untuk menerapkan kebijakan hak asasi manusia
ATAU
Perusahaan menyebutkan bahwa penilaian dampak hak asasi manusia telah dilakukan
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2 atau 1, namun perusahaan mendapat skor 0,5 di bawah a).

D.01.2 Perusahaan mempunyai sistem, sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia secara berkala di seluruh operasinya, untuk menilai dan mengatasi risiko hak asasi manusia. (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa:

A. Apakah ada sistem yang tersedia untuk memastikan operasi mereka mengidentifikasi dan menilai dampak penting dari aktivitas mereka terhadap hak asasi manusia?

- 2 poin** Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai dampak penting dari aktivitasnya terhadap hak asasi manusia, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.
- 1 poin** Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai dampak penting dari aktivitas mereka terhadap hak asasi manusia, namun tidak secara keseluruhan perusahaan.
ATAU
Perusahaan memberikan penjelasan tentang pendekatannya untuk mengidentifikasi dan menilai dampak penting dari aktivitasnya terhadap hak asasi manusia, namun tidak ada bukti adanya sistem di seluruh perusahaan
ATAU
Perusahaan memberikan bukti mengenai beberapa kasus operasi yang telah mengidentifikasi dan menilai dampak penting dari aktivitasnya terhadap hak asasi manusia, namun tidak ada bukti bahwa sistem di seluruh perusahaan sudah diterapkan.

- 0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengidentifikasi dan menilai dampak penting dari aktivitasnya terhadap hak asasi manusia, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua kasus operasi yang mengidentifikasi dan menilai dampak penting dari aktivitasnya terhadap hak asasi manusia
ATAU
Perusahaan memberikan bukti sistem yang diterapkan untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai dampak penting dari aktivitas mereka terhadap hak asasi manusia, namun sistem ini hanya berkaitan dengan rantai pasokan.

B. Apakah sistem sudah diterapkan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara mereka mengatasi dampak yang teridentifikasi.

- 2 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara perusahaan mengatasi dampak yang teridentifikasi, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.
- 1 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara mereka mengatasi dampak yang teridentifikasi, namun bukti mengenai cakupan dan/atau isi sistem ini terbatas.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara perusahaan mengatasi dampak yang teridentifikasi, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak untuk skala perusahaan secara keseluruhan
- 0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara mereka mengatasi dampak yang teridentifikasi, namun tidak ada informasi tentang ruang lingkup, konten, dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua operasi yang telah mengembangkan strategi dan rencana untuk mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara mereka mengatasi dampak yang teridentifikasi.

C. Melacak implementasi strategi dan rencana ini secara sistematis?

- 2 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) yang mengonfirmasi pelacakan sistematis penerapan strategi dan rencana ini di seluruh perusahaan.
- 1 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk melacak secara sistematis penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun bukti penggunaan sistem tersebut masih terbatas.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) dari pelacakan penerapan strategi dan rencana di beberapa operasinya, namun tidak ada bukti adanya pendekatan sistematis dan menyeluruh di seluruh perusahaan.
- 0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun tidak ada informasi yang diungkapkan selain deskripsi naratif.

D.01.3 Perusahaan melacak, meninjau dan bertindak untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan wilayah operasinya (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan bahwa secara sistematis:

A. Melacak dan mengungkapkan data, dalam periode waktu yang berurutan, mengenai kinerjanya dalam mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia di seluruh lokasi tambangnya, termasuk jumlah dan sifat kasus serta tindakan yang diambil sebagai responsnya?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia di seluruh lokasi tambangnya, termasuk jumlah dan sifat kasus serta tindakan yang diambil sebagai tanggapannya, dan data tersebut diungkapkan di seluruh perusahaan pada periode waktu yang berurutan.

1 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia di seluruh lokasi tambangnya, termasuk setidaknya jumlah dan sifat kasus, namun data tersebut tidak diungkapkan dalam periode waktu berturut-turut.
ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia di seluruh lokasi tambangnya, termasuk setidaknya jumlah dan sifat kasus, dan data tersebut diungkapkan dalam periode waktu yang berurutan namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

0.5 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia di seluruh lokasi tambangnya, termasuk jumlah atau sifat kasus saja.
ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) mengenai karyawan yang telah menerima pelatihan hak asasi manusia

B. Mengaudit dan/ atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data rinci mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai kinerjanya dalam mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan wilayah operasinya.

1 poin Perusahaan mengungkapkan data terbatas mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai kinerjanya dalam mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan wilayah operasinya.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa peninjauan dan/atau audit rutin atas kinerjanya dalam mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan wilayah operasinya diperlukan dan harus dilakukan oleh badan internal atau eksternal yang teridentifikasi, namun tidak ada informasi mengenai peninjauan dan/atau audit tersebut /atau audit yang benar-benar dilakukan, di luar pernyataan

C. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/ atau tinjauan tersebut, untuk berupaya meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil guna mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan, dan mengungkapkan data tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia.
- 1 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia, namun informasi mengenai integrasi rekomendasi tersebut terbatas.
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan untuk terus meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah dan memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia, namun tidak ada informasi mengenai peninjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, dan sehingga tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi.

D.01.4 Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia, hak atas tanah, lingkungan hidup, dan hak buruh di wilayah operasinya (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa perusahaan tersebut memiliki:

A. Meresmikan komitmennya, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia, tanah, lingkungan hidup, dan hak buruh di wilayah operasinya?

- 2 poin** Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia di wilayah operasinya dalam dokumen formal yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan dan didukung oleh manajemen senior.
- 1 poin** Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia di wilayah operasinya dalam dokumen formal yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan namun tidak ada bukti bahwa komitmen ini didukung oleh manajemen senior.
ATAU
Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia di wilayah operasinya dalam dokumen formal yang disahkan oleh manajemen senior namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.
ATAU
Perusahaan berkomitmen untuk menghormati beberapa hak dan perlindungan yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia di wilayah operasinya dalam sebuah dokumen formal yang didukung oleh manajemen senior.
- 0.5 poin** Perusahaan mengacu pada perlunya menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia di wilayah operasinya, namun tidak membuat komitmen yang jelas dalam dokumen formal yang didukung oleh manajemen senior

B. Menugaskan tanggung jawab dan akuntabilitas tingkat manajemen atau dewan direksi untuk melaksanakan komitmen ini?

- 2 poin** Perusahaan memiliki fungsi tingkat manajemen senior dan/atau Dewan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini dan terdapat informasi rinci mengenai ruang lingkup, peran, dan akuntabilitas sebenarnya
- 1 poin** Perusahaan memiliki fungsi tingkat manajemen senior dan/atau Dewan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini namun informasi mengenai ruang lingkup, peran, dan akuntabilitas aktualnya terbatas.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2, namun perusahaan mendapat skor 1 di bawah a).
- 0.5 poin** Perusahaan secara singkat menyebutkan fungsi di tingkat manajemen senior dan/atau tingkat Dewan untuk melaksanakan komitmen ini, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2 atau 1, tetapi perusahaan mendapat skor 0,5 di bawah a).

C. Berkomitmen sumber daya keuangan dan staf untuk melaksanakan komitmen ini?

- 2 poin** Perusahaan memiliki tim tingkat operasional di seluruh perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya penerapan komitmen ini.
ATAU
Perusahaan menyelenggarakan program kesadaran dan/atau pelatihan dan/atau lokakarya di seluruh perusahaan terkait dengan komitmennya dan terdapat bukti rinci mengenai sumber daya keuangan dan/atau kepegawaian spesifik yang berkomitmen
- 1 poin** Perusahaan menyelenggarakan program dan/atau lokakarya penyadaran dan/atau pelatihan di seluruh perusahaan terkait dengan penghormatan terhadap hak dan perlindungan yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia, tanah, lingkungan hidup, dan hak buruh, namun informasi mengenai kondisi keuangan dan/atau staf yang sebenarnya masih terbatas. sumber daya yang dilakukan.
ATAU
Perusahaan memiliki tim tingkat operasional di seluruh perusahaan yang mengoordinasikan upaya untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia, tanah, lingkungan hidup, dan hak buruh, namun hanya pada beberapa aspek terbatas
ATAU
Perusahaan mengalokasikan sumber daya keuangan dan/atau staf untuk melaksanakan komitmen ini (program kesadaran/pelatihan/lokakarya dan/atau tim yang bertanggung jawab) namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2, namun perusahaan mendapat skor 1 di bawah a).
- 0.5 poin** Perusahaan menyebutkan untuk mengadakan program penyadaran dan/atau pelatihan dan/atau lokakarya terkait dengan penghormatan terhadap hak dan perlindungan yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia, tanah, lingkungan hidup, dan hak buruh, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2 atau 1, namun perusahaan mendapat skor 0,5 di bawah a).

D.02.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengelola personel keamanan dan pasukan keamanan swasta melalui pemeriksaan, investigasi, pelaporan dan tindakan disipliner yang sesuai, sejalan dengan Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya:

A. Meninjau latar belakang personel keamanan dan pasukan keamanan swasta yang ingin mereka pekerjakan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan berlebihan, agar tidak mempekerjakan individu yang secara kredibel terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia untuk memberikan layanan keamanan?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya meninjau latar belakang personel keamanan dan pasukan keamanan swasta yang ingin mereka pekerjakan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan berlebihan dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan ini mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya meninjau latar belakang personel keamanan dan pasukan keamanan swasta yang ingin mereka pekerjakan, namun tidak ada bukti bahwa sistem ini dapat mengatasi penggunaan kekerasan yang berlebihan.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya meninjau latar belakang personel keamanan dan pasukan keamanan swasta yang ingin mereka pekerjakan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan berlebihan, namun bukti mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini terbatas

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya meninjau latar belakang personel keamanan dan pasukan keamanan swasta yang ingin mereka pekerjakan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan berlebihan dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini. , namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka memastikan operasinya meninjau latar belakang personel keamanan dan pasukan keamanan swasta yang ingin mereka pekerjakan, namun tidak ada informasi selain pernyataan.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti hanya satu atau dua kasus operasi setelah meninjau latar belakang personel keamanan dan pasukan keamanan swasta yang ingin mereka pekerjakan.

B. Mewajibkan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta, termasuk melalui ketentuan kontrak dalam perjanjian dengan penyedia keamanan, untuk menyelidiki dan melaporkan semua kasus yang menggunakan kekuatan fisik, dan untuk memberikan bantuan medis kepada orang-orang yang terluka, termasuk kepada pelanggar?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya memerlukan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta, termasuk melalui ketentuan kontrak dalam perjanjian dengan penyedia keamanan, untuk menyelidiki dan melaporkan semua kasus yang menggunakan kekuatan fisik, dan untuk memberikan bantuan medis kepada orang yang terluka. termasuk bagi pelanggar, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya memerlukan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta, termasuk melalui ketentuan kontrak dalam perjanjian dengan penyedia keamanan, untuk menyelidiki dan melaporkan semua kasus yang menggunakan kekuatan fisik, dan untuk memberikan bantuan medis kepada orang yang terluka. termasuk bagi pelanggar, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya memerlukan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta untuk menyelidiki dan melaporkan semua kasus yang menggunakan kekerasan fisik dan/atau memberikan bantuan medis kepada orang yang terluka, namun bukti mengenai ruang lingkup dan isinya terbatas. dari sistem ini

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka memastikan operasinya memerlukan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta untuk menyelidiki dan melaporkan semua kasus di mana kekuatan fisik digunakan dan/atau untuk memberikan bantuan medis kepada orang yang terluka, namun tidak ada informasi selain pernyataan.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti hanya satu atau dua kasus operasi yang memerlukan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta untuk menyelidiki dan melaporkan semua kasus yang menggunakan kekerasan fisik dan/atau memberikan bantuan medis kepada orang yang terluka.

C. Melakukan investigasi terhadap semua perilaku yang melanggar hukum atau kasar terhadap pekerja atau komunitas yang terkena dampak terkait dengan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta, dan mengambil tindakan disipliner yang sesuai?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melakukan investigasi terhadap semua perilaku yang melanggar hukum atau kasar terhadap pekerja atau komunitas yang terkena dampak terkait dengan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta, dan mengambil tindakan disipliner yang sesuai, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi tindakan tersebut.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melakukan investigasi terhadap semua perilaku yang melanggar hukum atau kasar terhadap pekerja atau komunitas yang terkena dampak terkait dengan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta, dan mengambil tindakan disipliner yang sesuai, namun terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi tindakan tersebut. sistem ini.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melakukan investigasi terhadap semua perilaku yang melanggar hukum atau kasar terhadap pekerja atau komunitas yang terkena dampak terkait dengan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta, dan mengambil tindakan disipliner yang sesuai, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi tindakan tersebut. sistem ini, namun mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka memastikan operasinya melakukan investigasi terhadap semua perilaku yang melanggar hukum atau kasar terhadap pekerja atau komunitas yang terkena dampak terkait dengan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta, dan mengambil tindakan disipliner yang sesuai, namun tidak ada informasi selain pernyataan.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti hanya satu atau dua kasus operasi yang melakukan investigasi atas semua perilaku yang melanggar hukum atau kasar terhadap pekerja atau komunitas yang terkena dampak terkait dengan personel keamanan dan pasukan keamanan swasta.

D.02.2 Perusahaan melacak, meninjau dan bertindak untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, sejalan dengan Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia.

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan bahwa secara sistematis:

A. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan periode waktu berturut-turut, mengenai kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

1 poin Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan data tersebut dibandingkan dengan target tetapi tidak dibandingkan antar perusahaan. periode waktu yang berurutan.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan data tersebut dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan tetapi tidak terhadap target.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data seluruh perusahaan mengenai kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan data tersebut dibandingkan dengan target dan dalam periode waktu yang berurutan, namun data tersebut sudah ketinggalan zaman. (lebih tua dari periode penilaian).

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan data tersebut dibandingkan terhadap target dan dalam periode waktu yang berurutan, namun data tersebut tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

0.5 poin Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan/atau publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, namun data tersebut juga tidak dibandingkan dengan target. melintasi periode waktu yang berurutan.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan/atau publik, untuk mencegah pelanggaran manusia. pelanggaran hak asasi manusia, dan datanya dibandingkan dengan target namun tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan dan tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terbaru (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan/atau publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan data tersebut dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan tetapi tidak terhadap perbandingan tepat sasaran dan tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data mengenai kinerjanya dalam mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan/atau publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan data tersebut dibandingkan dengan target dan dalam periode waktu yang berurutan, namun data tersebut sudah ketinggalan jaman (lebih tua dari periode penilaian) dan tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan

B. Mengaudit dan/ atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data rinci mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

1 poin Perusahaan mengungkapkan data terbatas mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa peninjauan dan/atau audit rutin terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan/atau publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, namun tidak ada informasi mengenai peninjauan dan/ atau audit yang benar-benar dilakukan, di luar pernyataan.

ATAU

Perusahaan menyatakan bahwa peninjauan/audit yang relevan telah dilakukan tetapi tidak memberikan rincian mengenai isi dan ruang lingkup audit.

C. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/ atau tinjauan tersebut, untuk berupaya meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia?

2 poin Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan dan mengungkapkan data tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil untuk mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, keamanan swasta dan publik. kekuatan, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

1 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan telah mengungkapkan informasi mengenai review dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, namun tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi, selain pernyataan.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mendukung pendidikan dan pelatihan personel keamanan, pasukan keamanan swasta dan publik, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, namun tidak ada informasi mengenai review dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, sehingga tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi.

D.02.3 Jika berlaku, perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melaksanakan uji tuntas yang lebih baik untuk mengidentifikasi, menilai, menghindari, dan memitigasi risiko bagi pekerja dan masyarakat khususnya yang terkait dengan kehadiran operasi di wilayah yang terkena dampak konflik dan tingkat tinggi. area berisiko (CAHRA), sejalan dengan Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi

Jika memungkinkan, dapatkah perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa perusahaan tersebut

A. Apakah ada sistem yang tersedia untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja dan masyarakat khususnya yang terkait dengan kehadiran mereka di wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja dan masyarakat terkait dengan kehadiran mereka di wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, sejalan dengan Prinsip

Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja atau masyarakat terkait dengan kehadiran mereka di wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, namun bukti mengenai cakupan dan/atau isi sistem ini terbatas.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja dan masyarakat terkait dengan kehadiran mereka di wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini, namun bukan berdasarkan skala perusahaan.

0.5 poin Perusahaan memberikan deskripsi naratif terbatas mengenai sistem yang ada untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja atau masyarakat terkait dengan kehadiran mereka di wilayah yang terkena dampak konflik atau berisiko tinggi, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, isi, dan implementasi sebenarnya. dari sistem ini.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua kasus operasi yang telah mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja atau masyarakat terkait dengan kehadiran mereka di wilayah yang terkena dampak konflik atau berisiko tinggi.

B. Apakah sistem sudah diterapkan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko-risiko yang teridentifikasi?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko-risiko yang teridentifikasi, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi ini, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini terbatas

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko-risiko yang teridentifikasi, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan

0.5 poin Perusahaan memberikan deskripsi naratif terbatas mengenai sistem yang ada untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi ini, namun tidak ada informasi tentang ruang lingkup, konten, dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti hanya satu atau dua operasi telah mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi ini.

C. Melacak implementasi strategi dan rencana ini secara sistematis?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) yang mengonfirmasi pelacakan sistematis penerapan strategi dan rencana ini di seluruh perusahaan.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem yang secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun tidak ada informasi yang diungkapkan selain deskripsi naratif.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti adanya sistem pelacakan yang lebih luas yang mencakup penerapan strategi dan rencana, namun bukan sistem pelacakan khusus.

D.03.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus yang memungkinkan partisipasi dari:

A. Perempuan dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus yang memungkinkan partisipasi perempuan dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah spesifik yang memungkinkan partisipasi perempuan dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan, namun bukti mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini terbatas

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah spesifik untuk memungkinkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam diskusi dan/pengambilan keputusan, namun hal ini tidak secara langsung merujuk pada sistem tersebut

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi perempuan dalam diskusi dan pengambilan keputusan, namun sistem tersebut hanya berhubungan dengan investasi sosial masyarakat.

0.5 poin Perusahaan memberikan bukti bahwa beberapa kegiatan dilakukan untuk mengembangkan mekanisme bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam diskusi atau pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka, namun tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem di seluruh perusahaan.

ATAU

Perusahaan menyatakan bahwa mereka memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam diskusi atau pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melibatkan perempuan, namun sistem tersebut tidak cukup spesifik mengenai partisipasi dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan

B. Remaja dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi kaum muda dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah spesifik yang memungkinkan partisipasi generasi muda dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan, namun bukti mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini masih terbatas

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah spesifik untuk memungkinkan partisipasi kelompok rentan dalam diskusi dan/pengambilan keputusan, namun tidak ada rujukan langsung pada kaum muda

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi kaum muda dalam diskusi dan pengambilan keputusan, namun sistem tersebut hanya berhubungan dengan investasi sosial masyarakat

0.5 poin Perusahaan memberikan bukti bahwa beberapa kegiatan dilakukan untuk mengembangkan mekanisme bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam diskusi atau pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka, namun tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem di seluruh perusahaan.

ATAU

Perusahaan menyatakan bahwa mereka memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam diskusi atau pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melibatkan kaum muda, namun sistem tersebut tidak cukup spesifik mengenai partisipasi dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan.

C. Penyandang disabilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi penyandang disabilitas dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi penyandang disabilitas dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan, namun bukti mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini terbatas.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi kelompok rentan dalam diskusi dan/pengambilan keputusan, namun tidak ada rujukan langsung kepada penyandang disabilitas

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi penyandang disabilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan, namun sistem tersebut hanya berkaitan dengan investasi sosial masyarakat

0.5 poin

Perusahaan memberikan bukti bahwa beberapa kegiatan dilakukan untuk mengembangkan mekanisme bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam diskusi atau pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka, namun tidak ada bukti bahwa terdapat pendekatan atau sistem yang diterapkan di seluruh perusahaan.

ATAU

Perusahaan menyatakan bahwa mereka memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam diskusi atau pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melibatkan penyandang disabilitas, namun sistem tersebut tidak cukup spesifik mengenai partisipasi dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan

2 poin

Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi penyandang disabilitas diskusi dan/atau pengambilan keputusan dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi penyandang disabilitas dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan, namun bukti mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini terbatas.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi kelompok rentan dalam diskusi dan/pengambilan keputusan, namun tidak ada rujukan langsung kepada penyandang disabilitas

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memungkinkan partisipasi penyandang disabilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan, namun sistem tersebut hanya berkaitan dengan investasi sosial masyarakat

0.5 poin

Perusahaan memberikan bukti bahwa beberapa kegiatan dilakukan untuk mengembangkan mekanisme bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam diskusi atau pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka, namun tidak ada bukti bahwa terdapat pendekatan atau sistem yang diterapkan di seluruh perusahaan.

ATAU

Perusahaan menyatakan bahwa mereka memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam diskusi atau pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada mereka, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melibatkan penyandang disabilitas, namun sistem tersebut tidak cukup spesifik mengenai partisipasi dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan

D.03.2 Perusahaan melacak, meninjau dan bertindak untuk meningkatkan kualitas hubungannya dengan masyarakat yang terkena dampak

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan bahwa secara sistematis:

A. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan periode waktu berturut-turut, mengenai kualitas hubungannya dengan masyarakat yang terkena dampak?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kualitas hubungannya dengan masyarakat yang terkena dampak dan data tersebut dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan.

1 poin Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kualitas hubungannya dengan masyarakat yang terkena dampak, namun data tersebut tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan.
ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) mengenai kualitas hubungannya dengan masyarakat yang terkena dampak, dan data tersebut dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan, namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan

0.5 poin Perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka melacak data mengenai kualitas hubungannya dengan masyarakat yang terkena dampak, namun tidak mengungkapkannya.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua kasus operasi yang melacak dan mengungkapkan data mengenai kualitas hubungan mereka dengan masyarakat yang terkena dampak.

B. Mengaudit dan/ atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan berbasis kepercayaan dengan masyarakat yang terkena dampak?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data rinci mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan berbasis kepercayaan dengan masyarakat yang terkena dampak.

1 poin Perusahaan mengungkapkan data terbatas mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan berbasis kepercayaan dengan masyarakat yang terkena dampak.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa peninjauan dan/atau audit rutin terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan berbasis kepercayaan dengan masyarakat yang terkena dampak diperlukan dan harus dilakukan oleh pihak internal atau internal yang teridentifikasi. badan eksternal, namun tidak ada informasi mengenai revidan/atau audit yang benar-benar dilakukan, selain pernyataan

C. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/ atau tinjauan tersebut, untuk berupaya meningkatkan efektivitas langkah-langkahnya guna membangun dan memelihara hubungan berbasis kepercayaan dengan masyarakat yang terkena dampak?

2 poin Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan dan mengungkapkan data tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan berbasis kepercayaan dengan masyarakat yang terkena dampak.

1 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau tinjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan berbasis kepercayaan dengan

masyarakat yang terkena dampak, dan telah mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, namun tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi, selain pernyataan.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau tinjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan berbasis kepercayaan dengan masyarakat yang terkena dampak namun tidak ada informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, dan dengan demikian tidak ada informasi tentang integrasi rekomendasi

D.04.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mendorong kewirausahaan lokal dan mendukung pengembangan usaha lokal, termasuk bagi perempuan. (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa:

A. Apakah sistem sudah diterapkan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan kewirausahaan dan bisnis lokal?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan kewirausahaan dan bisnis lokal, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan kewirausahaan dan bisnis lokal, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini terbatas.

ATAU

Perusahaan ini memberikan bukti adanya beberapa kasus operasi yang telah mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan kewirausahaan dan bisnis lokal, namun tidak ada bukti bahwa sistem di seluruh perusahaan sudah diterapkan

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan kewirausahaan dan bisnis lokal, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.

0.5 poin Perusahaan memberikan bukti bahwa beberapa kegiatan dilakukan untuk mengembangkan kewirausahaan dan bisnis lokal, namun tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem di seluruh perusahaan.

ATAU

Perusahaan menyatakan bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan kewirausahaan dan bisnis lokal, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, isi dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.

B. Apakah ada sistem yang tersedia untuk memastikan operasinya secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana ini?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana ini, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana ini, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini masih terbatas.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana ini, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.

- 0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana ini, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, isi aktual dan implementasi sistem ini.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua operasi yang secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana tersebut.

C. Melacak implementasi strategi dan rencana ini secara sistematis?

- 2 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) yang mengonfirmasi pelacakan sistematis penerapan strategi dan rencana ini di seluruh perusahaan.
- 1 poin Perusahaan mempunyai sistem yang secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun bukti penggunaan sistem tersebut masih terbatas.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan data aktual terkini dari penelusuran penerapan strategi dan rencana di beberapa operasinya, namun tidak ada bukti adanya pendekatan sistematis dan menyeluruh di seluruh perusahaan
- 0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun tidak ada informasi yang diungkapkan selain deskripsi naratif.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti hanya satu atau dua kasus operasi yang terisolasi dimana penerapan strategi dan rencana ini dilacak.

D.04.2 Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan peluang pengadaan lokal, termasuk bagi perempuan

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa:

A. Apakah sistem sudah diterapkan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan peluang pengadaan lokal?

- 2 poin Perusahaan ini mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan peluang pengadaan lokal, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.
- 1 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan peluang pengadaan lokal, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini terbatas.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan peluang pengadaan lokal, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.
- 0.5 poin Perusahaan memberikan bukti bahwa beberapa kegiatan dilakukan untuk mengembangkan peluang pengadaan lokal, namun tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem di seluruh perusahaan.
ATAU
Perusahaan menyatakan bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan peluang pengadaan lokal, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, isi dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.

B. Apakah ada sistem yang tersedia untuk memastikan operasinya secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana ini?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana ini, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana ini, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini masih terbatas.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana ini, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana ini, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, isi dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua operasi yang secara aktif melibatkan perempuan dalam strategi dan rencana tersebut.

C. Melacak implementasi strategi dan rencana ini secara sistematis?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) yang mengonfirmasi pelacakan sistematis penerapan strategi dan rencana ini di seluruh perusahaan.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem yang secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun bukti penggunaan sistem tersebut masih terbatas.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) dari penelusuran penerapan strategi dan rencana di beberapa operasinya, namun tidak ada bukti adanya pendekatan sistematis dan menyeluruh di seluruh perusahaan.

ATAU

Perusahaan mewajibkan pelacakan tersebut dilakukan sesuai standar formal (diungkapkan), namun bukti penggunaan sistem tersebut masih terbatas

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun tidak ada informasi yang diungkapkan selain deskripsi naratif.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti hanya satu atau dua kasus operasi yang terisolasi dimana penerapan strategi dan rencana ini dilacak.

D.04.3 Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian berkala mengenai dampak kegiatan mereka terhadap perempuan, remaja dan anak-anak

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya:

A. Melakukan dan mengungkapkan penilaian berkala mengenai dampak kegiatan mereka terhadap perempuan?

- 2 poin** Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin mengenai dampak kegiatan mereka terhadap perempuan, dan terdapat bukti rinci tentang ruang lingkup dan isi sistem ini.
- 1 poin** Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian dampak kegiatan mereka terhadap perempuan, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hal ini dilakukan secara rutin.
- 0.5 poin** Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua kasus operasi yang telah melakukan penilaian terhadap dampak kegiatan mereka terhadap perempuan, namun tidak ada bukti bahwa sistem di seluruh perusahaan sudah diterapkan.
ATAU
Perusahaan menyebutkan bahwa mereka melakukan penilaian terhadap dampak kegiatan mereka terhadap perempuan, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.

B. Melakukan dan mengungkapkan penilaian berkala mengenai dampak kegiatan mereka terhadap generasi muda?

- 2 poin** Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin mengenai dampak kegiatan mereka terhadap kaum muda, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.
- 1 poin** Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian dampak kegiatan mereka terhadap kaum muda, namun tidak ada bukti bahwa hal ini dilakukan secara rutin.
- 0.5 poin** Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua kasus operasi yang telah melakukan penilaian terhadap dampak kegiatan mereka terhadap kaum muda, namun tidak ada bukti adanya sistem yang berlaku di seluruh perusahaan.
ATAU
Perusahaan menyebutkan bahwa mereka melakukan penilaian terhadap dampak kegiatan mereka terhadap kaum muda, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.

C. Melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin mengenai dampak kegiatan mereka terhadap anak-anak?

- 2 poin** Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin mengenai dampak kegiatan mereka terhadap anak-anak, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.
- 1 poin** Perusahaan mempunyai sistem yang secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun bukti penggunaan sistem tersebut masih terbatas.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) dari penelusuran penerapan strategi dan rencana di beberapa operasinya, namun tidak ada bukti adanya pendekatan sistematis dan menyeluruh di seluruh perusahaan.
ATAU
Perusahaan mewajibkan pelacakan tersebut dilakukan sesuai standar formal (diungkapkan), namun bukti penggunaan sistem tersebut masih terbatas
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun tidak ada informasi yang diungkapkan selain deskripsi naratif.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti hanya satu atau dua kasus operasi yang terisolasi dimana penerapan strategi dan rencana ini dilacak.

D.05.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi, menilai, menghindari, dan memitigasi dampak buruk terhadap penggunaan lahan dan akses terhadap lahan oleh masyarakat yang terkena dampak (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa:

A. Apakah sistem sudah ada untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai dampak buruk terhadap penggunaan lahan dan akses terhadap lahan oleh masyarakat yang terkena dampak?

- 2 poin** Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai dampak buruk terhadap penggunaan lahan dan akses terhadap lahan oleh masyarakat yang terkena dampak, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.
- 1 poin** Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai dampak buruk terhadap penggunaan lahan dan akses terhadap lahan oleh masyarakat yang terkena dampak, namun bukti mengenai cakupan dan/atau isi sistem ini terbatas.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai dampak buruk terhadap penggunaan lahan dan akses terhadap lahan oleh masyarakat yang terkena dampak, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan.
- 0.5 poin** Perusahaan memberikan deskripsi naratif terbatas mengenai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan menilai dampak buruk terhadap penggunaan lahan dan akses terhadap lahan oleh masyarakat yang terkena dampak, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, isi dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua kasus operasi yang mengidentifikasi dan menilai dampak buruknya terhadap penggunaan lahan dan akses terhadap lahan oleh masyarakat yang terkena dampak.

B. Apakah sistem sudah diterapkan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk meminimalkan dan memitigasi dampak buruk ini?

2 poin Perusahaan memiliki sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk meminimalkan dan memitigasi dampak buruk ini, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk meminimalkan dan memitigasi dampak buruk ini, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini terbatas.

ATAU

Perusahaan memiliki sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk meminimalkan dan memitigasi dampak buruk ini, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.

0.5 poin Perusahaan memberikan deskripsi naratif terbatas mengenai sistem yang ada untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk meminimalkan dan memitigasi dampak buruk ini, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, konten, dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua operasi yang telah mengembangkan strategi dan rencana untuk meminimalkan dan memitigasi dampak buruk ini.

C. Melacak implementasi strategi dan rencana ini secara sistematis?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) yang mengonfirmasi pelacakan sistematis penerapan strategi dan rencana ini di seluruh perusahaan.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem yang secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun bukti penggunaan sistem tersebut masih terbatas.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data aktual terkini dari penelusuran penerapan strategi dan rencana di beberapa operasinya, namun tidak ada bukti adanya pendekatan sistematis dan menyeluruh di seluruh perusahaan.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka secara sistematis melacak penerapan strategi dan rencana ini di seluruh operasinya, namun tidak ada informasi yang diungkapkan selain deskripsi naratif.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data aktual terkini dari pelacakan implementasi strategi dan rencana, namun data tersebut hanya mencakup beberapa aspek terbatas dari dampak buruknya terhadap penggunaan lahan dan akses terhadap lahan oleh masyarakat yang terkena dampak.

D.06.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi, menilai, menghindari, dan memitigasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa:

A. Apakah ada sistem yang tersedia untuk memastikan operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian berkala mengenai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak kesehatan masyarakat, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

- 1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melakukan penilaian terhadap dampak kesehatan masyarakat, namun tidak memastikan pengungkapannya.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat di seluruh perusahaan, namun sistem tersebut tidak secara khusus menangani penilaian dampak.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian dampak kesehatan masyarakat secara berkala, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak untuk seluruh perusahaan
- 0.5 poin Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua kasus operasi yang telah menilai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti tindakan yang diambil untuk memahami dampak kesehatan masyarakat, namun tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem di seluruh perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin.
ATAU
Perusahaan memberikan deskripsi naratif yang terbatas mengenai sistem untuk memastikan operasinya melakukan penilaian terhadap dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, konten, dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.
ATAU
Perusahaan menyebutkan adanya program-program tersebut, namun program-program tersebut hanya membahas keselamatan masyarakat

B. Apakah sistem sudah ada untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi dampak-dampak ini?

- 2 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi dampak kesehatan masyarakat, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.
- 1 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi dampak ini, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini terbatas.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi dampak kesehatan masyarakat, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.
- 0.5 poin Perusahaan menyebutkan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi dampak kesehatan masyarakat, namun tidak mengungkapkan informasi mengenai ruang lingkup dan isi kegiatan-kegiatan tersebut dan tidak ada bukti adanya sistem di seluruh perusahaan.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melakukan penilaian dampak lingkungan (atau sejenisnya) yang mencakup penjelasan singkat tentang kesehatan masyarakat/komunitas.

C. Melacak implementasi strategi dan rencana ini secara sistematis?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) yang mengonfirmasi pelacakan sistematis penerapan strategi dan rencana ini di seluruh perusahaan.
- 1 poin** Perusahaan mempunyai sistem untuk melacak implementasi strategi dan rencana untuk mengatasi dampak kesehatan masyarakat, namun tidak mengungkapkan hasil terkait pelacakan ini.
- 0.5 poin** Tidak ada.

D.07.1 Perusahaan melacak, meninjau dan bertindak untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan bahwa secara sistematis:

A. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan periode waktu berturut-turut, mengenai kinerjanya dalam mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan, termasuk data terpilah di lokasi tambang mengenai penerapan rutin proses penilaian dampak gender?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan, termasuk data terpilah di lokasi tambang mengenai penerapan rutin proses penilaian dampak gender, dan data tersebut dibandingkan di seluruh perusahaan. periode waktu yang berurutan.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan, namun data tersebut tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan dan data tersebut dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan, namun tidak mencakup seluruh kegiatan perusahaan.
- 0.5 poin** Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan, namun data tersebut tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan dan tidak mencakup seluruh kegiatan perusahaan.

B. Mengaudit dan/ atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan data rinci mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan selama periode penilaian untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan data terbatas mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan.
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa peninjauan dan/atau audit rutin terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan diperlukan dan harus dilakukan oleh badan internal atau eksternal yang teridentifikasi, namun tidak ada informasi mengenai reviu dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, di luar pernyataan

C. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/ atau tinjauan tersebut, untuk berupaya meningkatkan efektivitas langkah - langkah yang diambil untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan, dan mengungkapkan data tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan.
- 1 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau tinjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan, dan telah mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan, namun tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi, selain pernyataan.
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau tinjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap perempuan, namun tidak ada informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, sehingga tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi.

D.08.1 Jika memungkinkan, perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya dirancang dan dilaksanakan, melalui partisipasi inklusif, strategi dan rencana untuk menghormati hak, kepentingan, dan kebutuhan Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak operasinya, sejalan dengan PBB Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat. (/6.00)

Jika memungkinkan, dapatkah perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasionalnya:

A. Mengidentifikasi, melalui partisipasi inklusif, seluruh Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait?

- 2 poin** Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengidentifikasi, melalui partisipasi inklusif, semua kelompok Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.
- 1 poin** Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengidentifikasi semua kelompok Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, namun tidak ada bukti bahwa sistem ini menjamin partisipasi inklusif.
- ATAU**
Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi, melalui partisipasi inklusif, semua kelompok Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, namun tidak pada skala perusahaan.
- 0.5 poin** Perusahaan memberikan bukti kegiatan atau hasil yang berkaitan dengan identifikasi kelompok Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, namun tidak ada bukti adanya sistem yang diterapkan.
- ATAU**
Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya memiliki pendekatan yang terencana untuk melibatkan kelompok Masyarakat Adat, namun sistem ini tidak secara jelas berhubungan dengan identifikasi seluruh kelompok yang terkena dampak.

B. Identifikasi, melalui partisipasi inklusif, hak, kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Adat ini?

- 2 poin** Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengidentifikasi, melalui partisipasi inklusif, hak, kepentingan dan kebutuhan kelompok Masyarakat Adat, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan dalam konteks kelompok Masyarakat Adat yang teridentifikasi, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini
- 1 poin** Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi hak, kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Adat, namun hal ini tidak secara jelas menjamin partisipasi inklusif.
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka menghormati hak, kepentingan dan kebutuhan kelompok Masyarakat Adat tersebut, namun tidak ada bukti adanya sistem di seluruh perusahaan untuk mengidentifikasi, melalui partisipasi inklusif, hak, kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Adat tersebut.
ATAU
Perusahaan menunjukkan bukti kegiatan atau hasil yang berkaitan dengan identifikasi hak, kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Adat, namun tidak ada bukti adanya sistem di seluruh perusahaan

C. Mengembangkan dan menerapkan strategi dan rencana, melalui partisipasi inklusif, untuk menghormati hak, kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Adat?

- 2 poin** Perusahaan memiliki sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan dan menerapkan strategi dan rencana, melalui partisipasi inklusif, untuk menghormati hak, kepentingan dan kebutuhan kelompok Masyarakat Adat ini, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan kontennya. dari sistem ini.
- 1 poin** Perusahaan memberikan bukti bahwa beberapa operasinya telah mengembangkan dan menerapkan strategi dan rencana untuk memenuhi penghormatan terhadap hak, kepentingan dan kebutuhan kelompok Masyarakat Adat ini, namun tidak ada bukti adanya sistem yang berlaku di seluruh perusahaan.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan perjanjian dengan kelompok Masyarakat Adat, namun sistem ini tidak secara jelas mencakup pengembangan dan implementasi strategi dan rencana untuk menghormati hak, kepentingan dan kebutuhan kelompok Masyarakat Adat tersebut.
- 0.5 poin** Perusahaan menunjukkan bukti terbatasnya aktivitas yang berkaitan dengan operasinya dalam mengembangkan dan menerapkan strategi dan rencana untuk menghormati hak, kepentingan, dan kebutuhan. dari kelompok Masyarakat Adat ini, namun tidak ada bukti adanya sistem yang berlaku di seluruh perusahaan.
ATAU
Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengembangkan dan menerapkan strategi dan rencana untuk menghormati hak, kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Adat ini, namun tidak ada informasi yang diungkapkan selain deskripsi

D.08.2 Jika memungkinkan, perusahaan melacak, meninjau dan bertindak untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat dan menghindari dampak buruk terhadap kehidupan dan warisan mereka. (/6.00)

Jika memungkinkan, dapatkan perusahaan Anda menunjukkan bahwa perusahaan Anda secara sistematis:

A. Melacak dan mengungkapkan data, dalam periode waktu yang berurutan, mengenai kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, serta dalam menghindari dampak buruk terhadap mata pencaharian dan warisan mereka?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, serta dalam menghindari dampak buruk terhadap mata pencaharian dan warisan mereka, dan data dibandingkan terhadap target dan periode waktu yang berurutan.

1 poin Perusahaan mengungkapkan data terbaru mengenai kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, serta dalam menghindari dampak buruk terhadap mata pencaharian dan warisan mereka, namun data tersebut tidak cukup komprehensif (misalnya tidak pada skala perusahaan, tidak pada tambang yang direncanakan, tidak pada periode waktu yang berurutan, tidak menangani semua hak, aspirasi, dampak yang relevan,...).

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian), namun hanya pada satu dimensi, dan mengungkapkan kesepakatan/rencana secara penuh.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka memantau kinerjanya dalam menghormati hak-hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, dan/atau dalam menghindari dampak buruk terhadap mata pencaharian dan warisan mereka, namun tidak mengungkapkan data apa pun.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti bahwa hanya satu atau dua kasus operasi yang telah melacak dan mengungkapkan data mengenai kinerja mereka dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, dan/atau dalam menghindari dampak buruk terhadap tambang mereka. kehidupan dan warisan.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian), namun data tersebut tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan dan hanya mencakup satu dimensi

B. Audit dan/ atau peninjauan, berdasarkan data dasar dan/ atau target, efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk menghormati hak dan aspirasi seluruh Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, serta untuk menghindari hal-hal yang merugikan. dampaknya terhadap penghidupan dan warisan mereka?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan data rinci mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk menghormati hak dan aspirasi seluruh Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, serta untuk menghindari dampak buruk terhadap penghidupan dan warisan mereka.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan data terbatas mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk menghormati hak dan aspirasi seluruh Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, serta untuk menghindari dampak buruk terhadap penghidupan dan warisan mereka.
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa peninjauan dan/atau audit rutin terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk menghormati hak dan aspirasi seluruh Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, serta untuk menghindari dampak buruk terhadap penghidupan dan warisan budaya mereka. diwajibkan dan harus dilakukan oleh badan internal atau eksternal yang teridentifikasi, namun tidak ada informasi mengenai peninjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, selain pernyataan

C. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/ atau tinjauan tersebut, untuk berupaya meningkatkan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, serta dalam menghindari dampak buruk. tentang mata pencaharian dan warisan mereka?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan dan mengungkapkan data tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan dan pertambangan saat ini dan yang direncanakan. fasilitas terkait, serta menghindari dampak buruk terhadap penghidupan dan warisan mereka.
- 1 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, serta menghindari dampak buruk terhadap tambang mereka. mata pencaharian dan warisan budaya, dan telah mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan, namun tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi, selain pernyataan.
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi masyarakat adat. Perusahaan berkomitmen untuk 'bekerja untuk mendapatkan persetujuan Masyarakat Adat' dalam sebuah dokumen formal Masyarakat yang berpotensi terkena dampak pertambangan saat ini dan yang direncanakan serta fasilitas terkait, serta upaya untuk menghindari dampak buruk terhadap mata pencaharian dan warisan budaya mereka, namun tidak ada informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, sehingga tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi.

D.09.1 Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak Masyarakat Adat atas Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC), dan untuk mendukung perluasan prinsip FPIC kepada kelompok lain yang terkena dampak proyek. (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa perusahaan tersebut memiliki:

A. Meresmikan komitmennya, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak-hak Masyarakat Adat atas FPIC dan untuk mendukung perluasan prinsip FPIC ke kelompok lain yang terkena dampak proyek?

2 poin Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak Masyarakat Adat atas FPIC dan mendukung perluasan prinsip FPIC kepada kelompok lain yang terkena dampak proyek dalam dokumen formal yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan dan didukung oleh manajemen senior.

1 poin Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak Masyarakat Adat atas FPIC dan mendukung perluasan prinsip FPIC kepada kelompok lain yang terkena dampak proyek dalam dokumen formal yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan, namun tidak ada bukti bahwa komitmen ini didukung oleh manajemen senior.

ATAU

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak-hak Masyarakat Adat atas FPIC dan mendukung perluasan prinsip FPIC kepada kelompok lain yang terkena dampak proyek dalam sebuah dokumen formal yang disahkan oleh manajemen senior namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

ATAU

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak Masyarakat Adat atas FPIC dalam dokumen formal yang didukung oleh manajemen senior namun komitmen tersebut hanya mencakup beberapa aspek terbatas atau tidak menyebutkan perluasan prinsip FPIC ke kelompok lain yang terkena dampak proyek.

ATAU

Perusahaan berkomitmen untuk 'bekerja untuk mendapatkan persetujuan Masyarakat Adat' dalam dokumen formal dan komitmen ini diperluas ke kelompok lain yang terkena dampak proyek.

0.5 poin Perusahaan mengacu pada perlunya menghormati hak-hak Masyarakat Adat atas FPIC, namun tidak membuat komitmen yang jelas dalam dokumen formal yang didukung oleh manajemen senior.

ATAU

Perusahaan berkomitmen untuk 'bekerja untuk mendapatkan persetujuan Masyarakat Adat' dalam sebuah dokumen formal.

ATAU

Perusahaan mengacu pada pemenuhan persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Posisi ICMM tentang Masyarakat Adat dan/atau IFC PS 7.

B. Menugaskan tanggung jawab dan akuntabilitas tingkat manajemen atau dewan direksi untuk melaksanakan komitmen ini?

2 poin Perusahaan memiliki fungsi tingkat manajemen senior dan/atau Dewan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini dan terdapat informasi rinci mengenai ruang lingkup, peran, dan akuntabilitas sebenarnya.

1 poin Perusahaan memiliki fungsi tingkat manajemen senior dan/atau Dewan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini namun informasi mengenai ruang lingkup, peran, dan akuntabilitas aktualnya terbatas.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2, namun perusahaan mendapat skor 1 di bawah a).

0.5 poin Perusahaan secara singkat menyebutkan fungsi di tingkat manajemen senior dan/atau tingkat Dewan untuk melaksanakan komitmen ini, namun tidak memberikan informasi tambahan apa pun.
ATAU
Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2 atau 1, namun perusahaan mendapat skor 0,5 di bawah a).

C. Berkomitmen sumber daya keuangan dan staf untuk melaksanakan komitmen ini?

2 poin Perusahaan memiliki tim tingkat operasional di seluruh perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya penghormatan hak-hak Masyarakat Adat atas PADIATAPA dan mendukung perluasan prinsip PADIATAPA kepada kelompok lain yang terkena dampak proyek.

ATAU

Perusahaan menyelenggarakan program kesadaran dan/atau pelatihan dan/atau lokakarya di seluruh perusahaan terkait dengan komitmennya dan terdapat bukti rinci mengenai sumber daya keuangan dan/atau kepegawaian spesifik yang dikomitmenkan.

1 poin Perusahaan menyelenggarakan program dan/atau lokakarya penyadaran dan/atau pelatihan di seluruh perusahaan terkait dengan hak Masyarakat Adat atas FPIC, namun informasi mengenai sumber daya keuangan dan/atau staf aktual yang dilakukan masih terbatas.

ATAU

Perusahaan memiliki tim tingkat operasional di seluruh perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya penghormatan hak-hak Masyarakat Adat atas FPIC namun hanya pada beberapa aspek terbatas dari hak-hak Masyarakat Adat atas FPIC atau tidak menyebutkan perluasan prinsip FPIC ke proyek lain. -kelompok yang terkena dampak.

ATAU

Perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan komitmen ini (program kesadaran/pelatihan/lokakarya dan/atau tim yang bertanggung jawab) namun tidak pada skala perusahaan.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2, namun perusahaan mendapat skor 1 di bawah a).

0.5 poin Perusahaan mengungkapkan informasi yang terbatas mengenai kesadaran/program pelatihan/lokakarya di seluruh perusahaan atau tim di tingkat operasional terkait dengan FPIC.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti yang memenuhi syarat untuk mendapat skor 2 atau 1, namun perusahaan mendapat skor 0,5 di bawah a).

D.10.1 Jika memungkinkan, perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi, menilai, menghindari, dan memitigasi potensi dampak perpindahan fisik dan/atau ekonomi yang tidak disengaja dari masyarakat yang terkena dampak proyek (/6.00)

Jika memungkinkan, dapatkan perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasionalnya:

A. Menilai dampak potensial dari perpindahan fisik dan/ atau ekonomi yang tidak disengaja dari masyarakat yang terkena dampak proyek?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem yang berlaku di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya menilai potensi dampak dari perpindahan fisik dan/atau ekonomi yang tidak disengaja dari masyarakat yang terkena dampak proyek, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem yang diterapkan untuk memastikan operasinya menilai potensi dampak dari pemindahan fisik dan/atau ekonomi yang tidak disengaja dari masyarakat yang terkena dampak proyek, namun terdapat bukti yang terbatas mengenai ruang lingkup dan/atau isi dari sistem ini.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem yang diterapkan untuk memastikan operasinya menilai potensi dampak dari pemindahan fisik dan/atau ekonomi yang tidak disengaja dari masyarakat yang terkena dampak proyek, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi dari sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengkaji dampak potensial dari pemindahan fisik dan/atau ekonomi yang tidak disengaja dari masyarakat yang terkena dampak proyek, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, isi dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti mengenai terbatasnya kegiatan yang berkaitan dengan penilaian dampak potensial dari perpindahan fisik dan/atau ekonomi yang tidak disengaja dari masyarakat yang terkena dampak proyek, namun tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem yang berlaku di seluruh perusahaan.

B. Mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan dan memitigasi dampak negatif?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan dan memitigasi dampak negatif, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan dan memitigasi dampak negatif, dan memberikan contoh penerapan sistem ini, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini terbatas

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan dan memitigasi dampak negatif, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini terbatas.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti mengenai beberapa kasus operasi yang telah mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan dan memitigasi dampak negatif, namun tidak ada bukti bahwa sistem di seluruh perusahaan sudah diterapkan.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan dan memitigasi dampak negatif, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.

0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan dan memitigasi dampak negatif, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, konten dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.

ATAU

Perusahaan menunjukkan bukti terbatasnya aktivitas terkait pengembangan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan, dan memitigasi dampak negatif, namun tidak ada bukti adanya sistem di seluruh perusahaan.

C. Melibatkan masyarakat yang terkena dampak proyek dalam penilaian dampak dan dalam pengembangan strategi untuk mengelola dampak-dampak ini?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya melibatkan masyarakat yang terkena dampak proyek dalam penilaian dampak dan dalam pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan bahwa operasinya melibatkan masyarakat yang terkena dampak proyek dalam kegiatan pemukiman kembali, namun tidak secara khusus mengacu pada keterlibatan masyarakat yang terkena dampak proyek dalam penilaian dampak dan dalam pengembangan strategi untuk mengelola dampak tersebut.

ATAU

Perusahaan memberikan bukti adanya beberapa kasus operasi yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak proyek dalam kegiatan pemukiman kembali, namun tidak ada bukti adanya sistem di seluruh perusahaan.

0.5 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melibatkan masyarakat yang terkena dampak proyek dalam penilaian dampak dan dalam pengembangan strategi untuk mengelolanya, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, isi dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.

ATAU

Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya melibatkan masyarakat yang terkena dampak proyek dalam penilaian dampak dan dalam pengembangan strategi untuk mengelolanya, namun tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, isi dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.

ATAU

Perusahaan menyebutkan adanya pedoman yang memberikan panduan dalam melibatkan masyarakat yang terkena dampak pemukiman kembali, namun hal ini tidak diungkapkan dan tidak ada/sangat sedikit rincian yang diberikan.

D.10.2 Jika memungkinkan, perusahaan menelusuri, meninjau dan bertindak untuk meningkatkan kinerjanya dalam memastikan bahwa penghidupan ditingkatkan atau dipulihkan setelah adanya pemukiman kembali secara paksa. (/6.00)

Jika memungkinkan, dapatkah perusahaan Anda menunjukkan bahwa perusahaan Anda secara sistematis:

A. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan target serta dalam jangka waktu berturut-turut, mengenai kinerjanya dalam memastikan bahwa mata pencaharian ditingkatkan atau dipulihkan setelah adanya pemukiman kembali secara paksa?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam memastikan bahwa mata pencaharian ditingkatkan atau dipulihkan setelah pemukiman kembali tidak secara sukarela dan data tersebut dibandingkan dengan target dan dalam periode waktu yang berurutan.

1 poin Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam memastikan bahwa penghidupan ditingkatkan atau dipulihkan setelah pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan datanya dibandingkan dengan target namun tidak dibandingkan antar periode waktu berturut-turut.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam memastikan bahwa penghidupan ditingkatkan atau dipulihkan setelah pemukiman kembali tidak secara sukarela dan datanya dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan namun tidak diungkapkan berdasarkan target.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data seluruh perusahaan mengenai kinerjanya dalam memastikan bahwa mata pencaharian ditingkatkan atau dipulihkan setelah pemukiman kembali secara paksa, dan data tersebut diungkapkan berdasarkan target dan dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut, namun data tersebut sudah usang (lebih tua dari periode penilaian)

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terbaru (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam memastikan bahwa mata pencaharian ditingkatkan atau dipulihkan setelah pemukiman kembali tidak secara sukarela dan data tersebut dibandingkan dengan target dan periode waktu berturut-turut, namun data tersebut tidak mencakup seluruh kegiatan perusahaan.

0.5 poin Perusahaan mengungkapkan data terbaru seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam memastikan bahwa mata pencaharian ditingkatkan atau dipulihkan setelah pemukiman kembali secara paksa, namun data tersebut tidak diungkapkan berdasarkan target dan tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terbaru (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam memastikan bahwa mata pencaharian ditingkatkan atau dipulihkan setelah pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan data tersebut dibandingkan dengan target tetapi tidak dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut dan tidak mencakup seluruh kegiatan perusahaan.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data terbaru (dalam periode penilaian) mengenai kinerjanya dalam memastikan bahwa mata pencaharian ditingkatkan atau dipulihkan setelah pemukiman kembali tidak secara sukarela dan data tersebut dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut tetapi tidak diungkapkan berdasarkan target dan tidak mencakup seluruh kegiatan perusahaan.

ATAU

Perusahaan mengungkapkan data mengenai kinerjanya dalam memastikan bahwa mata pencaharian ditingkatkan atau dipulihkan setelah pemukiman kembali secara paksa, dan data tersebut diungkapkan berdasarkan target dan dibandingkan dalam periode waktu berturut-turut, namun data tersebut sudah ketinggalan jaman (lebih tua dari periode penilaian) dan tidak mencakup semua dari aktivitas perusahaan

B. Mengaudit dan/ atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola pemukiman kembali secara tidak sukarela dengan cara yang memastikan bahwa penghidupan ditingkatkan atau dipulihkan?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data rinci mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk mengelola pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan cara yang memastikan bahwa penghidupan ditingkatkan atau dipulihkan.

- 1 poin Perusahaan mengungkapkan data terbatas mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk mengelola pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan cara yang memastikan bahwa penghidupan ditingkatkan atau dipulihkan.
- 0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka memberi mandat kepada suatu badan internal atau eksternal yang teridentifikasi untuk melakukan peninjauan dan/atau audit rutin terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola pemukiman kembali secara tidak sukarela dengan cara yang menjamin peningkatan penghidupan atau dipulihkan, namun tidak ada informasi mengenai revidu dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, di luar pernyataan.

C. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/ atau tinjauan tersebut, untuk berupaya meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam mengelola pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan cara yang memastikan bahwa penghidupan ditingkatkan atau dipulihkan?

- 2 poin Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan dan mengungkapkan data tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan cara yang memastikan bahwa penghidupan ditingkatkan atau pulih.
- 1 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan cara yang memastikan bahwa mata pencaharian ditingkatkan atau dipulihkan, dan telah mengungkapkan informasi mengenai peninjauan dan/ atau audit yang sebenarnya telah dilakukan, namun tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi, selain pernyataan.
- 0.5 poin Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau peninjauan tersebut untuk terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan cara yang menjamin peningkatan penghidupan atau dipulihkan, namun tidak ada informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, sehingga tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi.

D.11.1 Jika memungkinkan, perusahaan memiliki sistem untuk memastikan operasinya memfasilitasi keterlibatan dengan komunitas dan aktivitas pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM) di dalam dan sekitar operasi mereka. (/6.00)

Jika memungkinkan, dapatkah perusahaan Anda menunjukkan di tingkat korporat bahwa perusahaan tersebut:

A. Memiliki sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang beroperasi dalam aktivitas ASM di sekitar operasinya?

- 2 poin Perusahaan memiliki sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang beroperasi dalam aktivitas ASM di sekitar operasi mereka, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan konten sistem ini.
- 1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang beroperasi dalam aktivitas ASM, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau konten sistem ini terbatas.
- ATAU

Perusahaan memiliki sistem untuk memastikan operasinya mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang beroperasi dalam aktivitas ASM di sekitar operasinya, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan konten sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.

0.5 poin Perusahaan memberikan bukti kegiatan terkait identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan yang beroperasi dalam aktivitas ASM, namun tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem di seluruh perusahaan.

B. Apakah sistem sudah diterapkan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan yang teridentifikasi, termasuk melalui pembuatan perjanjian keterlibatan jika diperlukan?

2 poin Perusahaan memiliki sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan ASM yang teridentifikasi, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan konten sistem ini.

1 poin Perusahaan memiliki sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan ASM yang teridentifikasi, namun bukti mengenai cakupan dan/atau konten sistem ini terbatas.

ATAU

Perusahaan memiliki sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan ASM yang teridentifikasi, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan konten sistem ini, namun tidak pada skala perusahaan secara keseluruhan.

0.5 poin Perusahaan menunjukkan bukti aktivitas terkait pengembangan strategi dan rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan ASM yang teridentifikasi, namun tidak ada bukti adanya sistem di seluruh perusahaan.

C. Melacak implementasi strategi dan rencana ini secara sistematis?

2 poin Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) yang mengonfirmasi pelacakan sistematis penerapan strategi dan rencana ini di seluruh perusahaan.

1 poin Perusahaan mempunyai sistem untuk melacak implementasi strategi dan rencana untuk mengatasi keterlibatan dengan pemangku kepentingan ASM, namun tidak mengungkapkan data apa pun.

0.5 poin Perusahaan menunjukkan bukti terbatasnya aktivitas terkait pelacakan implementasi strategi dan rencana untuk mengatasi keterlibatan pemangku kepentingan ASM, namun tidak ada bukti adanya sistem di seluruh perusahaan.

D.11.2 Jika memungkinkan, perusahaan memiliki sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan peluang untuk mendukung program bantuan teknis dan/atau program mata pencaharian alternatif bagi penambang ASM di dalam dan sekitar operasi mereka (/6.00)

Jika memungkinkan, dapatkah perusahaan Anda menunjukkan kepada perusahaan bahwa mereka mempunyai sistem untuk memastikan operasinya:

A. Menilai kebutuhan dan kelayakan penyediaan dukungan teknis dan/ atau mata pencaharian bagi penambang ASM?

2 poin Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya menilai kebutuhan, dan kelayakan, memberikan dukungan teknis dan/atau mata pencaharian kepada komunitas ASM di sekitar operasi mereka, dan terdapat bukti rinci tentang ruang lingkup dan konten sistem ini.

- 1 poin** Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya menilai kebutuhan, dan kelayakan, memberikan dukungan teknis dan/atau mata pencaharian kepada komunitas ASM di sekitar operasinya, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi dari sistem ini terbatas.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya menilai kebutuhan, dan kelayakan, pemberian dukungan teknis dan/atau mata pencaharian kepada komunitas ASM di sekitar operasi mereka, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada dasar seluruh perusahaan.
- 0.5 poin** Perusahaan memberikan bukti kegiatan yang berkaitan dengan penilaian kebutuhan, dan kelayakan, pemberian dukungan teknis dan/atau mata pencaharian kepada komunitas ASM di sekitar operasinya, namun tidak ada bukti adanya pendekatan atau sistem di seluruh perusahaan.

B. Kembangkan strategi dan rencana berdasarkan penilaian ini?

- 2 poin** Perusahaan memiliki sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mendukung program bantuan teknis dan/atau program mata pencaharian alternatif bagi penambang ASM sesuai dengan penilaiannya, dan terdapat bukti terperinci mengenai ruang lingkup dan konten sistem ini.
- 1 poin** Perusahaan mempunyai sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mendukung program bantuan teknis dan/atau program mata pencaharian alternatif bagi penambang ASM sesuai dengan penilaiannya, namun bukti mengenai cakupan dan/atau isi dari sistem tersebut terbatas.
ATAU
Perusahaan mempunyai sistem untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mendukung program bantuan teknis dan/atau program mata pencaharian alternatif bagi penambang ASM sesuai dengan penilaiannya, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini, namun tidak pada dasar seluruh perusahaan.
- 0.5 poin** Perusahaan memberikan deskripsi naratif terbatas mengenai sistem yang ada untuk memastikan operasinya mengembangkan strategi dan rencana untuk mendukung program bantuan teknis dan/atau program mata pencaharian alternatif bagi penambang ASM, namun tidak ada informasi tentang ruang lingkup, konten, dan implementasi sebenarnya dari sistem ini.
ATAU
Perusahaan menunjukkan bukti terbatasnya aktivitas terkait pengembangan strategi dan rencana untuk mendukung program bantuan teknis dan/atau program mata pencaharian alternatif bagi penambang ASM, namun tidak ada bukti adanya sistem di seluruh perusahaan

C. *Terlibat dengan penambang ASM dalam penilaian kebutuhan ini dan dalam pengembangan strategi dan rencana apa pun?*

- 2 poin** Perusahaan memiliki sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya melibatkan komunitas ASM dalam penilaian kebutuhan, dan kelayakan, memberikan dukungan teknis dan/atau mata pencaharian kepada komunitas ASM di sekitar operasinya dan/atau dalam pengembangan proyek apa pun. bantuan teknis dan/atau mata pencaharian alternatif peluang, dan terdapat bukti rinci mengenai ruang lingkup dan isi sistem ini.
- 1 poin** Perusahaan memiliki sistem di seluruh perusahaan untuk memastikan operasinya melibatkan komunitas ASM dalam penilaian kebutuhan, dan kelayakan, memberikan dukungan teknis dan/atau mata pencaharian kepada komunitas ASM di sekitar operasinya dan/atau dalam pengembangan proyek apa pun. bantuan teknis dan/atau peluang mata pencaharian alternatif, namun bukti mengenai ruang lingkup dan/atau isi sistem ini masih terbatas.
- 0.5 poin** Perusahaan menunjukkan bukti terbatasnya keterlibatan komunitas ASM dalam penilaian kebutuhan dan kelayakan pemberian dukungan teknis dan mata pencaharian kepada komunitas ASM di sekitar operasinya dan/atau dalam pengembangan bantuan teknis dan/atau peluang mata pencaharian alternatif. namun tidak ada bukti adanya sistem di seluruh perusahaan.
ATAU
Perusahaan menyatakan bahwa mereka terlibat dengan ASM, namun tujuan dari keterlibatan tersebut tidak secara jelas spesifik untuk menilai kebutuhan dan mengembangkan rencana.

D.12.1 Perusahaan melacak, meninjau dan bertindak untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan bagi masyarakat. (/6.00)

Dapatkan perusahaan Anda menunjukkan bahwa secara sistematis:

A. *Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan periode waktu berturut-turut, mengenai fungsi dan penggunaan mekanisme pengaduan bagi masyarakat, termasuk jumlah dan sifat pengaduan serta tindakan yang diambil sebagai tanggapannya?*

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) termasuk jumlah, sifat dan tindakan yang diambil sebagai respons, dan data tersebut dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan.
ATAU
Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada keluhan masyarakat yang diajukan sama sekali selama periode penilaian, dan datanya dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan data terkini seluruh perusahaan (dalam periode penilaian) hanya pada dua dari tiga dimensi: jumlah, sifat, atau tindakan yang diambil sebagai respons.
ATAU
Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada keluhan masyarakat yang diajukan sama sekali selama periode penilaian, namun datanya tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) termasuk jumlah, sifat dan tindakan yang diambil sebagai respons dan data dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan, namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.
ATAU
Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada keluhan masyarakat yang diajukan sama sekali selama periode penilaian dan datanya dibandingkan selama periode waktu berturut-turut, namun tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

- 0.5 poin** Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) hanya pada salah satu dari tiga dimensi: jumlah, sifat, atau tindakan yang diambil sebagai respons.
ATAU
Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada keluhan masyarakat yang diajukan selama periode penilaian hanya pada beberapa dimensi saja.
ATAU
Perusahaan mengungkapkan data terkini (dalam periode penilaian) hanya pada dua dari tiga dimensi: jumlah, sifat atau tindakan yang diambil sebagai respons, namun data tersebut tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan dan tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan.
ATAU
Perusahaan melaporkan bahwa tidak ada keluhan masyarakat yang diajukan sama sekali dalam periode penilaian, namun data tersebut tidak dibandingkan dalam periode waktu yang berurutan dan tidak mencakup seluruh aktivitas perusahaan.

B. Audit dan/ atau peninjauan, berdasarkan perspektif pelapor, efektivitas mekanisme pengaduan bagi masyarakat?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan data rinci mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan selama periode penilaian untuk menilai efektivitas mekanisme pengaduan bagi masyarakat.
- 1 poin** Perusahaan mengungkapkan data terbatas mengenai tinjauan dan/atau audit yang dilakukan dalam periode penilaian untuk menilai efektivitas mekanisme pengaduan bagi masyarakat.
ATAU
Perusahaan secara formal mewajibkan untuk melakukan peninjauan dan/atau audit secara berkala, namun hanya mengungkapkan informasi tingkat tinggi mengenai audit/peninjauan tersebut.
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa peninjauan dan/atau audit rutin terhadap efektivitas mekanisme pengaduan bagi masyarakat diperlukan dan harus dilakukan oleh badan internal atau eksternal yang teridentifikasi, namun tidak ada informasi mengenai peninjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan selain dari itu.

C. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/ atau tinjauan tersebut, untuk berupaya meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan bagi masyarakat?

- 2 poin** Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang sebenarnya dilakukan dan mengungkapkan data tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan rekomendasi dan menindaklanjuti temuan untuk terus meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut serta terus meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan bagi masyarakat.
- 1 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau tinjauan untuk berupaya meningkatkan kinerjanya dalam mengelola isu hak asasi manusia, namun informasi mengenai integrasi rekomendasi tersebut terbatas.
- 0.5 poin** Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan rekomendasi dari audit dan/atau tinjauan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani isu-isu hak asasi manusia, namun tidak ada informasi mengenai tinjauan dan/atau audit yang benar-benar dilakukan, sehingga tidak ada informasi mengenai integrasi rekomendasi